

# LAPORAN KINERJA

Kota Madiun

---

2021



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2021 telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana yang seharusnya.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2021 merupakan bentuk evaluasi untuk mengungkapkan keberhasilan ataupun menjelaskan ketidakberhasilan penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu Laporan Kinerja merupakan rangkaian proses akuntabilitas penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 ke dalam perencanaan sasaran, program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini diupayakan untuk menyampaikan kinerja Pemerintah Kota Madiun atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2021 dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.



Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun,

2022



**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	KP – 1
DAFTAR ISI.....	DI – 1
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I – 1
A. Latar Belakang.....	BAB I – 1
B. Maksud dan Tujuan.....	BAB I – 2
C. Gambaran Umum Daerah.....	BAB I – 3
D. Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	BAB I – 28
E. Sistematika.....	BAB I – 34
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	BAB II – 1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.....	BAB II – 2
B. Perjanjian Kinerja.....	BAB II – 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	BAB III – 1
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	BAB III – 2
1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran.....	BAB III – 2
2) Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	BAB III – 3
3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	BAB III – 6
1. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ).....	BAB III – 7
2. Misi Kedua : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.....	BAB III – 36
3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.....	BAB III – 46
4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.....	BAB III – 59
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	BAB III – 82



BAB IV PENUTUP.....	BAB IV – 1
A. Kesimpulan.....	BAB IV – 1
B. Permasalahan .....	BAB IV – 2
C. Upaya Meningkatkan Kinerja.....	BAB IV – 3



# P BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.



Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2021, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.



Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan ssecara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;
2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan ssecara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

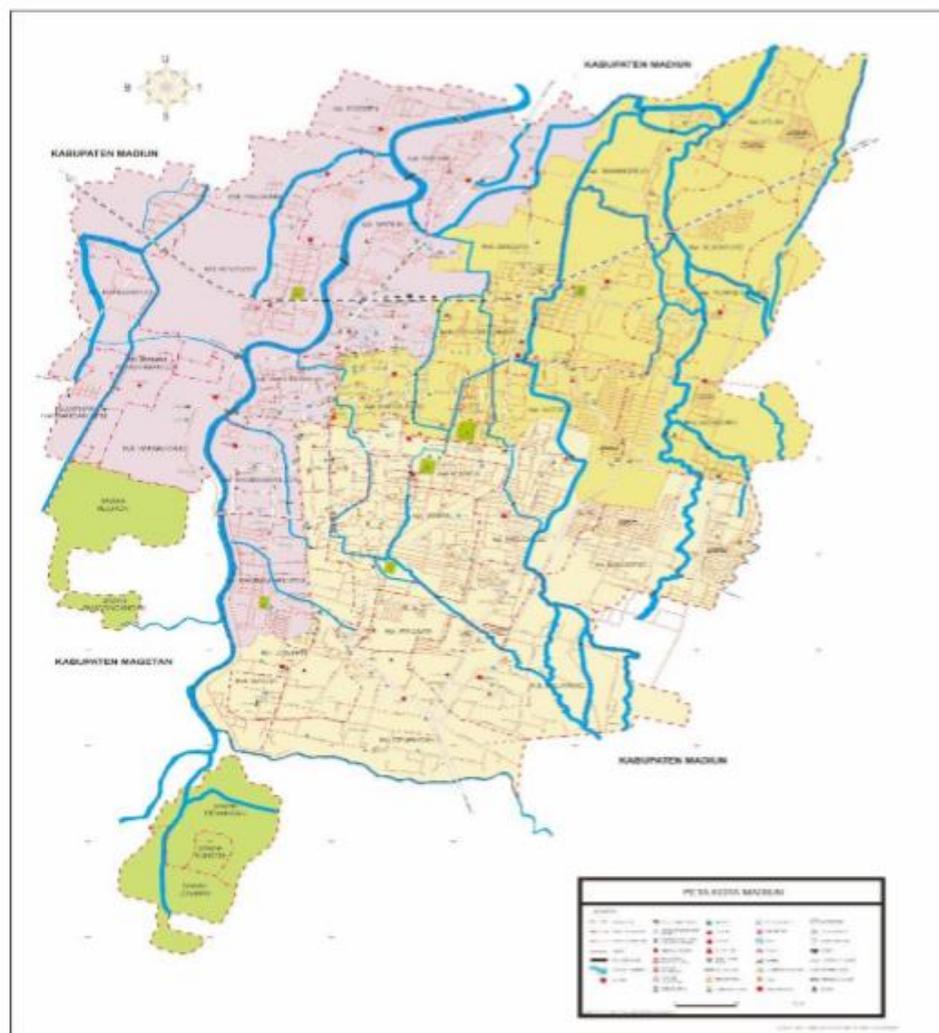
## **C. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis**

Ssecara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Kota Madiun mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa

Tengah, sehingga posisi ini menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.

**Gambar I.1. Wilayah Administrasi Kota Madiun**

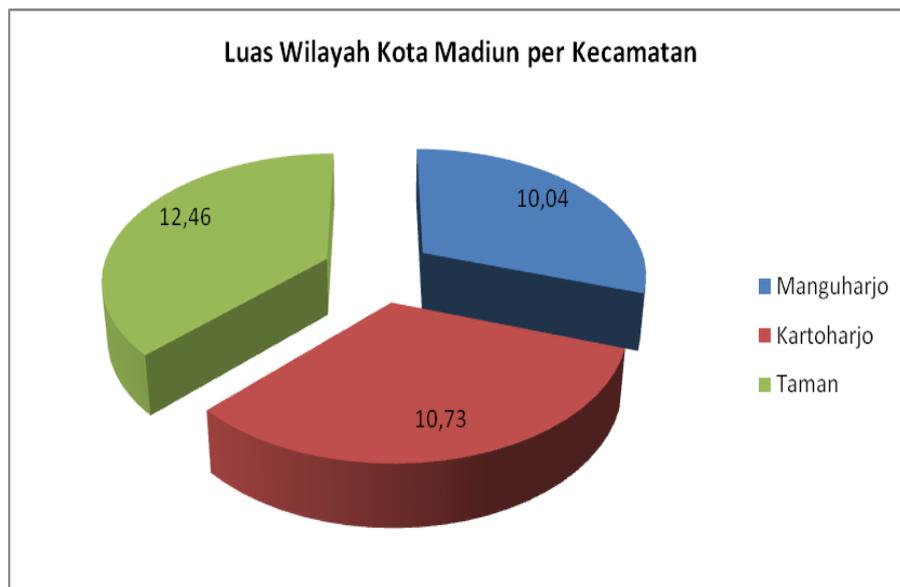


Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

secara astronomis, Kota Madiun terletak antara  $7^{\circ}$  -  $8^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $111^{\circ}$  -  $112^{\circ}$  Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Berdasarkan BPS Kota Madiun Tahun 2020, Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar  $33,23 \text{ km}^2$  yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Taman dengan luasan sebesar  $12,46 \text{ km}^2$  (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas  $10,73 \text{ km}^2$  (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas  $10,04 \text{ km}^2$  (30,21%). Pada masing-masing kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan. Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

**Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan**



Sumber: BPS Kota Madiun Tahun 2020



Berdasarkan kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian  $\pm$  63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Rata-rata suhu udara selama tahun 2021 di Kota Madiun adalah antara 23,23-25,00° C . Penyinaran matahari paling tinggi persentasenya terdapat di bulan September sedangkan kecepatan angin paling besar terjadi di Bulan Oktober sebesar 66,67 knot.

Kota Madiun tertelak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

Pengukuran curah hujan dilakukan di 3 (tiga) stasiun. Masing-masing adalah Stasiun Klegen, Stasiun Rejoagung dan Stasiun Kota. Dari ketiga stasiun tersebut, tercatat bahwa di Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021 hanya terjadi hujan sekali di Stasiun Kota.



Jumlah hari hujan terbanyak yaitu 22 hari, terjadi pada bulan Maret, tercatat di Stasiun Rejoagung. Sementara itu rata-rata curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Kota di bulan Maret, sebesar 27,24 mm3/hari.

## 2. Kondisi Demografis

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan bulan Oktober 2021 sebanyak 72.516 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 19.824 jiwa, Kecamatan Manguharjo 22.411 jiwa, dan Kecamatan Taman 30.281 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021**

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kartoharjo	57.985	57.927	57.748	44.704	19.777
2.	Manguharjo	62.879	62.801	63.017	48.754	22.307
3	Taman	88.945	89.069	889.350	68.765	30.188
	<b>Total</b>	<b>209.809</b>	<b>209.797</b>	<b>210.115</b>	<b>162.223</b>	<b>72.272</b>

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Semester II Tahun 2021*

Sedangkan rincian data jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.



**Tabel I.2. Data Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin  
Tahun 2021**

NO	RANGE USIA	KECAMATAN									JUMLAH		
		KARTOHARJO			MANGUHARJO			TAMAN			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
1	0 - 1 Thn	250	245	495	241	253	494	365	315	680	856	813	1.669
2	1 - 2 Thn	342	336	678	370	331	701	533	497	1.030	1.245	1.164	2.409
3	2 - 3 Thn	346	356	702	387	360	747	578	499	1.077	1.311	1.215	2.526
4	3 - 4 Thn	343	346	689	375	370	745	557	513	1.070	1.275	1.229	2.504
5	4 - 5 Thn	334	338	672	377	393	770	591	521	1.112	1.302	1.252	2.554
6	5 - 6 Thn	383	320	703	366	388	754	576	549	1.125	1.325	1.257	2.582
7	6 - 7 Thn	356	368	724	403	335	738	571	535	1.106	1.330	1.238	2.568
8	7 - 8 Thn	360	359	719	398	398	796	634	615	1.249	1.392	1.372	2.764
9	8 - 9 Thn	383	376	759	434	406	840	573	554	1.127	1.390	1.336	2.726
10	9 - 10 Thn	370	379	749	436	398	834	622	588	1.210	1.428	1.365	2.793
11	10 - 11 Thn	416	385	801	456	409	865	665	629	1.294	1.537	1.423	2.960
12	11 - 12 Thn	431	413	844	436	414	850	583	639	1.222	1.450	1.466	2.916
13	12 - 13 Thn	412	381	793	423	422	845	680	617	1.297	1.515	1.420	2.935
14	13 - 14 Thn	432	393	825	405	399	804	684	634	1.318	1.521	1.426	2.947
15	14 - 15 Thn	434	427	861	472	496	968	671	643	1.314	1.577	1.566	3.143
16	15 - 16 Thn	468	428	896	461	498	959	683	700	1.383	1.612	1.626	3.238
17	16 - 17 Thn	431	432	863	466	455	921	703	634	1.337	1.600	1.521	3.121
18	17 - 18 Thn	409	421	830	474	423	897	668	641	1.309	1.551	1.485	3.036
19	18 - 19 Thn	481	412	893	487	439	926	734	712	1.446	1.702	1.563	3.265
20	19 - 20 Thn	475	425	900	489	427	916	652	666	1.318	1.616	1.518	3.134
21	20 - 21 Thn	440	430	870	466	405	871	741	709	1.450	1.647	1.544	3.191
22	21 - 22 Thn	456	458	914	456	458	914	751	688	1.439	1.663	1.604	3.267
23	22 - 23 Thn	459	439	898	429	448	877	708	614	1.322	1.596	1.501	3.097
24	23 - 24 Thn	409	399	808	462	425	887	682	600	1.282	1.553	1.424	2.977
25	24 - 25 Thn	419	377	796	454	399	853	647	597	1.244	1.520	1.373	2.893
26	25 - 26 Thn	428	416	844	438	437	875	652	640	1.292	1.518	1.493	3.011
27	26 - 27 Thn	433	454	887	439	442	881	587	632	1.219	1.459	1.528	2.987
28	27 - 28 Thn	402	419	821	410	396	806	605	608	1.213	1.417	1.423	2.840
29	28 - 29 Thn	375	340	715	444	416	860	611	574	1.185	1.430	1.330	2.760
30	29 - 30 Thn	384	394	778	433	430	863	586	605	1.191	1.403	1.429	2.832
31	30 - 31 Thn	398	377	775	385	396	781	506	515	1.021	1.289	1.288	2.577
32	31 - 32 Thn	362	396	740	427	407	834	529	590	1.119	1.357	1.359	2.716
33	32 - 33 Thn	375	366	741	436	391	827	561	611	1.172	1.372	1.368	2.740
34	33 - 34 Thn	348	395	743	366	362	728	540	512	1.052	1.254	1.269	2.523
35	34 - 35 Thn	341	346	687	378	401	779	536	529	1.065	1.255	1.276	2.531
36	35 - 36 Thn	359	373	732	439	404	843	553	566	1.119	1.351	1.343	2.694
37	36 - 37 Thn	424	369	793	415	444	859	591	590	1.181	1.430	1.403	2.833
38	37 - 38 Thn	403	395	798	454	463	917	700	698	1.398	1.557	1.556	3.113
39	38 - 39 Thn	387	414	801	437	456	893	653	682	1.335	1.477	1.552	3.029
40	39 - 40 Thn	411	461	872	522	500	1.022	732	756	1.488	1.665	1.717	3.382
41	40 - 41 Thn	430	427	857	442	439	881	679	646	1.325	1.551	1.512	3.063
42	41 - 42 Thn	436	458	894	496	451	947	666	692	1.358	1.598	1.601	3.199
43	42 - 43 Thn	420	427	847	509	478	987	689	704	1.393	1.618	1.609	3.227
44	43 - 44 Thn	406	454	860	456	480	936	649	628	1.277	1.511	1.562	3.073
45	44 - 45 Thn	412	405	817	436	424	860	638	637	1.275	1.486	1.466	2.952
46	45 - 46 Thn	436	450	886	460	498	958	690	730	1.420	1.586	1.678	3.264
47	46 - 47 Thn	442	421	863	435	393	828	653	677	1.330	1.530	1.491	3.021
48	47 - 48 Thn	377	372	749	412	425	837	588	628	1.216	1.377	1.425	2.802
49	48 - 49 Thn	376	390	766	419	403	822	619	600	1.219	1.414	1.393	2.807
50	49 - 50 Thn	424	410	834	470	434	904	624	640	1.264	1.518	1.484	3.002
51	50 - 51 Thn	383	446	829	444	399	843	605	606	1.211	1.432	1.451	2.883
52	51 - 52 Thn	383	415	798	412	422	834	606	631	1.237	1.401	1.468	2.869
53	52 - 53 Thn	393	411	804	407	445	852	551	643	1.194	1.351	1.499	2.850
54	53 - 54 Thn	342	414	756	377	432	809	595	638	1.233	1.314	1.484	2.798
55	54 - 55 Thn	326	383	709	369	386	755	520	564	1.084	1.215	1.333	2.548
56	55 - 56 Thn	293	329	622	336	351	687	470	560	1.030	1.099	1.240	2.339
57	56 - 57 Thn	378	423	801	360	442	802	573	651	1.224	1.311	1.516	2.827
58	57 - 58 Thn	325	335	660	283	319	602	459	551	1.010	1.067	1.205	2.272
59	58 - 59 Thn	304	398	702	302	375	677	492	556	1.048	1.098	1.329	2.427
60	59 - 60 Thn	296	343	639	297	357	654	446	534	980	1.039	1.234	2.273
61	60 - 61 Thn	247	319	566	282	349	631	395	511	906	924	1.179	2.103
62	61 - 62 Thn	286	325	611	303	372	675	456	526	982	1.045	1.223	2.268
63	62 - 63 Thn	285	307	592	302	317	619	453	504	957	1.040	1.128	2.168
64	63 - 64 Thn	260	296	556	247	355	602	398	448	846	905	1.099	2.004



NO	RANGE USIA	KECAMATAN									JUMLAH		
		KARTOHARJO			MANGUHARJO			TAMAN			L	P	JML
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			
65	64 - 65 Thn	250	264	514	264	324	588	372	470	842	886	1.058	1.944
66	65 - 66 Thn	213	273	486	251	281	532	330	372	702	794	926	1.720
67	66 - 67 Thn	203	259	462	232	247	479	345	385	730	780	891	1.671
68	67 - 68 Thn	203	234	437	226	292	518	301	367	668	730	893	1.623
69	68 - 69 Thn	214	210	424	205	224	429	289	326	615	708	760	1.468
70	69 - 70 Thn	173	193	366	184	235	419	247	312	559	604	740	1.344
71	70 - 71 Thn	151	184	335	171	201	372	222	244	466	544	629	1.173
72	71 - 72 Thn	125	168	293	138	214	352	179	269	448	442	651	1.093
73	72 - 73 Thn	127	159	286	135	187	322	184	238	422	446	584	1.030
74	73 - 74 Thn	121	174	295	110	167	277	163	261	424	394	602	996
75	74 - 75 Thn	75	136	211	87	138	225	117	173	290	279	447	726
76	75 - 100 Thn	693	1.197	1.890	952	1.855	2.807	992	1.957	2.949	2.637	5.009	7.646
77	> 100 Thn	9	23	32	50	76	126	19	43	62	78	142	220
JUMLAH		27.106	28.352	55.458	29.307	30.681	59.988	42.067	43.939	86.006	98.480	102.972	201.452

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Semester II

Persebaran penduduk serta perbandingan antara penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan di Kota Madiun adalah sebagaimana tersaji pada grafik berikut ini. Sebagaimana terlihat pada grafik, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara banyaknya penduduk pria dengan wanita pada masing-masing kecamatan.

Hal ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk pria maupun wanita cukup merata diseluruh wilayah masing-masing kecamatan. Dengan persebaran yang relatif merata, diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena diharapkan tidak terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang terlalu besar antara masing-masing kecamatan.

Sementara itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 69.421 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 519 jiwa; D-III 5.770 jiwa; S-1 20.170 jiwa; S-2 1.415 jiwa, dan S-3 41 jiwa.

Ssecara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2017 s/d 2021 dapat dilihat dalam table berikut :

**Tabel I. 3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 s/d 2021**

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	32.430	31.258	31.374	32.536	33.177
Tidak Tamat SD;	18.755	19.575	19.887	19.779	18.906
Tamat SD;	30.919	30.169	29.266	28.253	26.006
Tamat SLTP;	29.836	29.487	28.787	28.048	26.027
Tamat SLTA;	71.494	72.405	73.045	73.008	69.421
Tamat D-I/II;	452	468	498	502	519
Tamat D-III;	5.566	5.639	5.761	5.912	5.770
Tamat S-1;	19.065	19.431	20.071	20.536	20.170
Tamat S-2;	1.268	1.334	1.391	1.417	1.415
Tamat S-3.	24	31	35	39	41

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Semester II

### 3. Kondisi Makro Ekonomi

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2021**

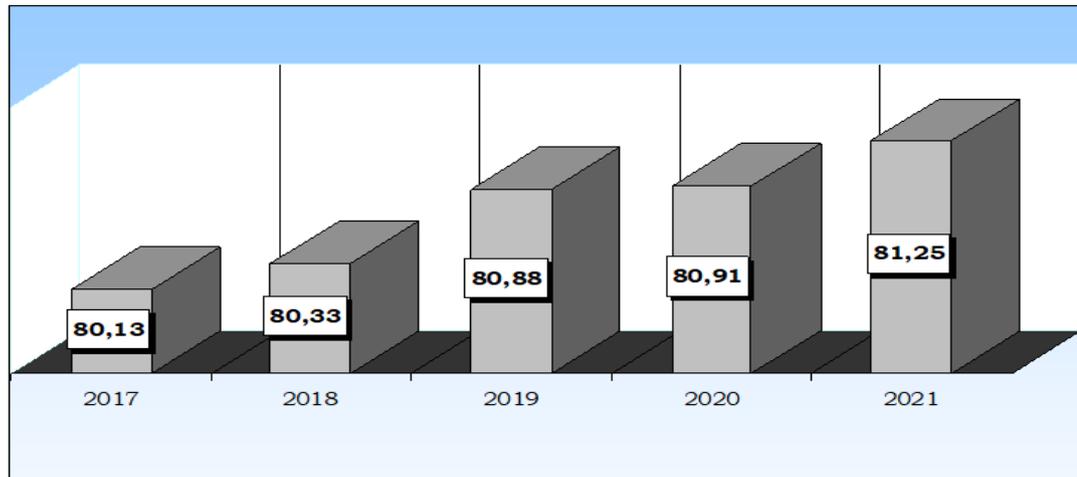
No	Indikator	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,91	81,25
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-3,39	4,73
3	Inflasi	Persen	1,86	2,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,32	8,15
5	Kemiskinan	Persen	4,98	5,09

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

### 1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. Pandemi Covid-19 hanya membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kota Madiun. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 80,91 atau tumbuh 0,04 persen dibanding tahun sebelumnya, dan merupakan pertumbuhan terkecil disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil sekitar 0,01 sampai 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi Covid-19 berangsur menurun serta geliat ekonomi memulih, berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021 mencapai 81,25 atau tumbuh sebesar 0,42 persen terhadap tahun 2020.

**Grafik 1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun, 2017-2021**

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel 1.5. IPM Kota Madiun**

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli
<b>2017</b>	72,48	14,20	11,10	15.415
<b>2018</b>	72,59	14,21	11,10	15.616
<b>2019</b>	72,75	14,39	11,13	16.040
<b>2020*</b>	72,81	14,40	11,14	16.018
<b>2021**</b>	72,83	14,41	11,37	16.095

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun



Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2017 hingga 2021, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2017) menjadi 72,83

tahun (2021) atau naik sebesar 0,35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2017 hingga 2021, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,20 tahun (2017) menjadi 14,41 tahun (2021) atau naik sebesar 0,21 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.



Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,10 tahun (2017) menjadi 11,37 tahun (2021) atau naik 0,27 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,095 juta per tahun, naik tipis 0,48 persen dibanding tahun 2020 lalu. Akibat pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Madiun tahun 2020 mengalami penurunan 0,14 persen dibanding tahun sebelumnya.

### **1.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel I.6. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2021**	14.699,83	10.748,10
2020*	13.769,29	10.262,44
2019	14.107,34	10.623,07
2018	13.128,89	10.051,29
2017	12.140,90	9.486,14

Sumber : BPS Kota Madiun  
\*\*) Angka sangat sementara

Ssecara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut :



**Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017-2021 (%)**

Lapangan Usaha/ Industry	2017	2018	2019	2020x	2021xx
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,78	1,78	-0,94	11,57	-7,26
B Pertambangan dan Penggalan	2,31	1,07	2,41	-5,65	-4,12
C Industri Pengolahan	8,00	7,01	4,64	-12,84	6,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,45	6,69	1,98	2,95
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,84	4,44	4,52	4,86	6,28
F Konstruksi	5,57	2,03	4,90	-4,71	-0,90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,83	7,52	6,19	-11,18	10,16
H Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	9,23	8,86	-7,98	3,21
J Informasi dan Komunikasi	6,77	5,34	4,58	16,12	4,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	4,08	4,79	-0,66	0,47
L Real Estat	4,22	3,57	5,96	0,33	1,19
M,N Jasa Perusahaan	6,34	5,31	6,10	-3,18	0,77
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	4,48	3,85	-2,23	-0,99
P Jasa Pendidikan	4,50	4,21	7,65	1,97	0,54
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	7,38	7,52	9,98	5,46
R,S,T,U Jasa Lainnya	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,08
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,93</b>	<b>5,96</b>	<b>5,69</b>	<b>-3,39</b>	<b>4,73</b>

Sumber : BPS Kota Madiun

Sejak wabah pandemi Covid19 akhir 2019 hingga sekarang melanda hampir di seluruh negara, roda perekonomian dunia melemah bahkan sampai dengan akhir tahun 2020 beberapa telah mengklaim negara mengalami resesi. Pemerintah negara terdampak wabah harus bekerja keras untuk mengendalikan diantara merebaknya wabah dan bergerakaknya roda perekonomian, kesehatan masyarakatnya menjadi prioritas tetapi perekonomian juga harus tetap tumbuh, seperti proses kelahiran, ibu dan anak keduanya harus diselamatkan.



Periode April sampai dengan Juni merupakan waktu yang berat bagi kinerja ekonomi di wilayah manapun seiring dengan masih merebaknya wabah Covid19 termasuk Kota Madiun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun Tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 13,769 triliun. Dalam periode yang sama, PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 10,262 triliun. Secara nominal, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 3,10% jika dibandingkan terhadap PDRB Tahun 2019. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan sepi pengunjung hotel dan restoran. Selain itu, kebijakan belajar di rumah juga berdampak pada sepi usaha penyediaan kamar kos bagi mahasiswa/pelajar.

Jika ditinjau struktur perekonomian Kota Madiun Tahun 2020, pergerakan lapangan usaha masih didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (24,05% dari total PDRB), Informasi dan Komunikasi (15,78% dari total PDRB), Industri Pengolahan (14,74% dari total PDRB), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (10,33% dari total PDRB). Dibandingkan periode sebelumnya, posisi distribusi PDRB terjadi pergeseran dari kategori lapangan usaha Industri Pengolahan di posisi kedua mulai tergeser oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang sebelumnya pada posisi ketiga. Pergeseran tersebut sangatlah wajar mengingat kebutuhan komunikasi utamanya internet pada masa pandemi dengan berbagai regulasi yang ada, untuk sarana komunikasi serta informasi meningkat tajam. Sementara itu lapangan usaha Industri pengolahan mengalami tekanan akselerasi yang cukup tinggi di seluruh subkategori kecuali industri pengolahan tembakau terakselerasi akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau, serta meningkatnya produksi pada industri kimia dan farmasi.



Ssecara umum, kinerja ekonomi Kota Madiun Tahun 2020 tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Pelemahan ekonomi Kota Madiun bersumber dari pelemahan daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha. Penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi.

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2016-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel I.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020*	2021**
<b>Kota Madiun</b>	<b>5,93</b>	<b>5,96</b>	<b>5,69</b>	<b>-3,39</b>	<b>0,43</b>
Madiun	5,42	5,10	5,42	-1,69	
Magetan	5,09	5,25	5,04	-1,64	
Ngawi	5,07	5,26	5,05	-1,69	
Pacitan	4,98	5,51	5,08	-1,84	
Ponorogo	5,10	5,31	5,01	-0,90	

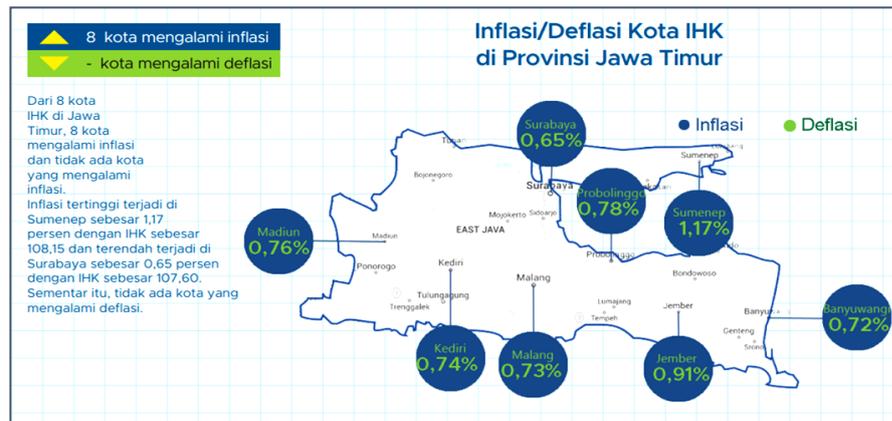
Sumber : BPS Kota Madiun

\*) Angka Sangat Sementara

### 1.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian ssecara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

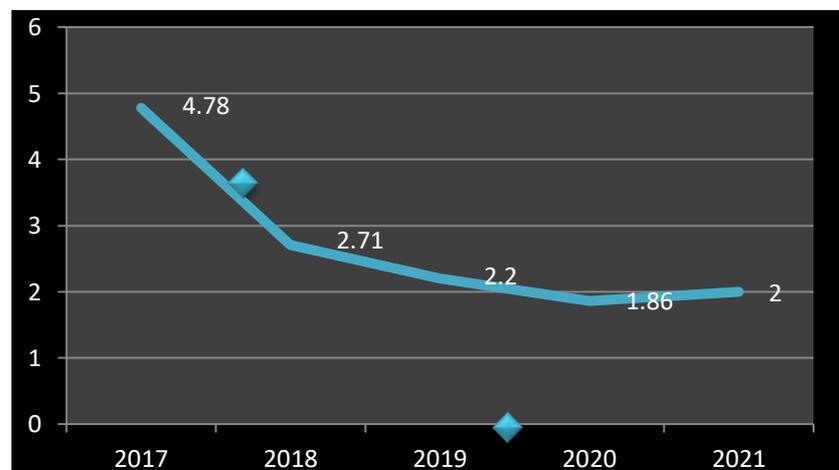
**Gambar 1.4. Inflasi/Deflasi Kota IHK di Provinsi Jawa Timur**



Sumber : BPS Kota Madiun

Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2021 terhadap sebesar 2,00 persen. Adapun pada Bulan Desember 2021 sendiri terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,44. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 1,17 persen dengan IHK 108,15 dan inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,65 persen dengan IHK 107,60. Adapun secara umum Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,69 persen dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,57 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Nasional dari tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing sebesar 1,87 persen.

**Gambar 1.5. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah



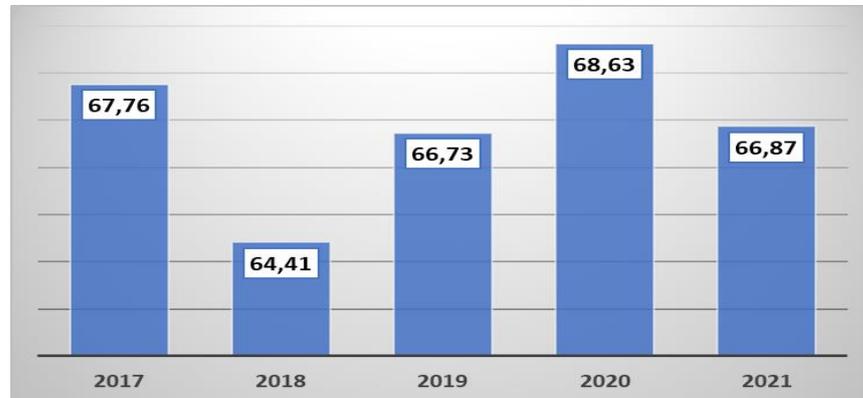
Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan dengan naiknya indeks harga konsumen (IHK) kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Sementara itu beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga diantaranya kelompok kesehatan turun sebesar 1,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,06 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks.

#### **1.3.4. Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 144.219 ribu orang, naik sebanyak 658 orang dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 96,44 ribu orang (66,87 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 88,58 ribu orang penduduk yang bekerja dan 7,86 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 2,09 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 1,75 ribu orang dan pengangguran juga turun sebanyak 336 orang.

## ✚ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

**Gambar I.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 66,87 persen, turun 1,76 persen poin dibanding Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,16 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,31 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 3,64 persen poin untuk TPAK laki-laki dan 0,04 persen poin untuk TPAK perempuan.

## ✚ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah

tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

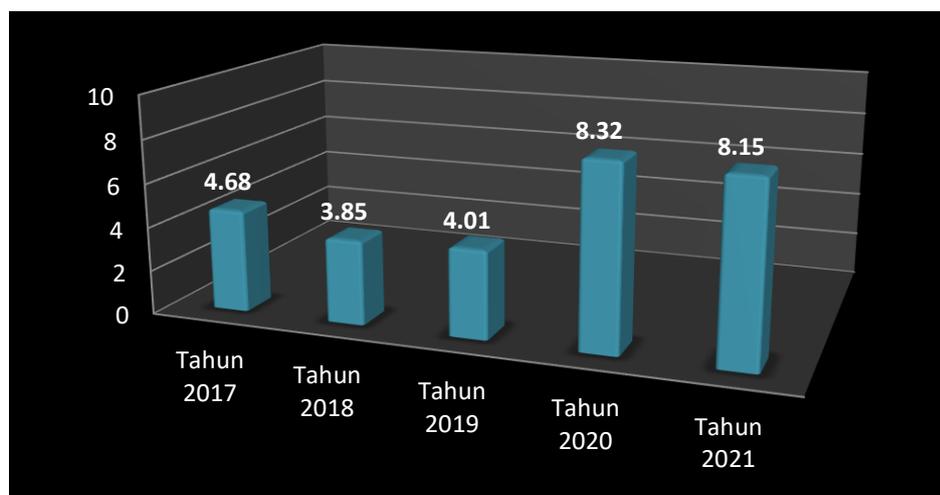
**Tabel I.9. Angkatan Kerja Kota Madiun Tahun 2020-2021**

KEGIATAN	2020	2021
<b>ANGKATAN KERJA</b>	98.529	96.439
- <b>BEKERJA</b>	90.334	88.580
- <b>PENGANGGURAN</b>	8.195	7.859
<b>BUKAN ANKATAN KERJA</b>	45.032	47.780
<b>PENDUDUK USIA KERJA</b>	<b>143.561</b>	<b>144.219</b>

Apabila dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2020 ke 2021 didapati penurunan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan menurunnya jumlah penduduk bekerja serta jumlah pengangguran. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja turun sebanyak 1.754 jiwa atau turun sebesar 1,94 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 8.195 menjadi 7.859 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 336 jiwa atau 4,10 persen.

Kenaikan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja tahun 2021 dari 45.032 menjadi 47.780 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 2.748 jiwa atau 4,8 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 143.561 jiwa menjadi 144.219 jiwa di tahun 2021, dengan persentase kenaikan sebesar 0,46 persen.

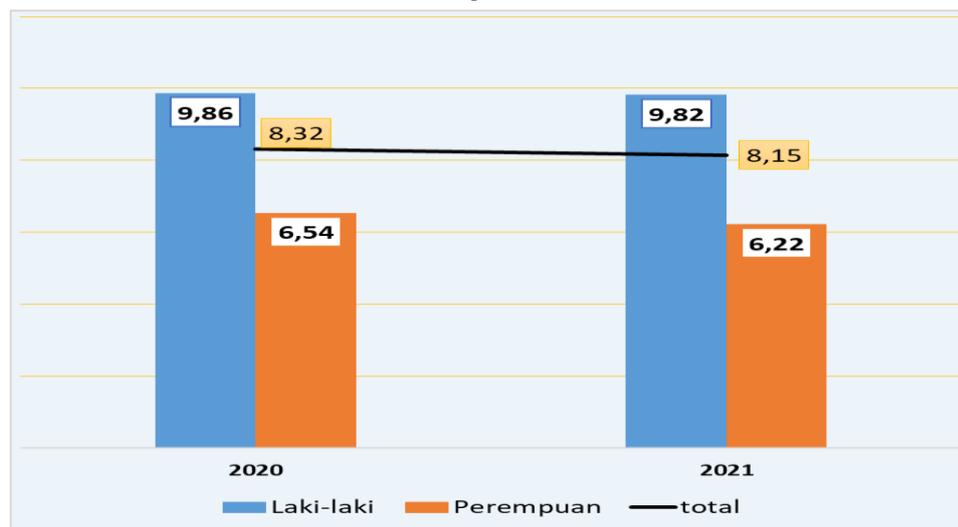
**Gambar 1.7. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masih merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, salah satu fenomenanya adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran masih tinggi. TPT laki-laki sebesar 9,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,22 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Agustus 2021 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2020, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,23 persen poin.

**Gambar 1.8. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2020-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu :

- Pengangguran Karena COVID-19;
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19;
- Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19;
- Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19.



Kondisi (a) dan (b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (c) dan (d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

<b>KOMPONEN</b>	<b>2021</b>
a. Pengangguran Karena Covid-19	1.243
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	1.165
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	2.057
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengangguran Jam Kerja Karena Covid-19	19.920
<b>Total</b>	<b>24.385</b>
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	<b>144.219</b>
<b>Persentase terhadap PUK</b>	<b>16,91%</b>

### 1.3.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif masih dipicu oleh adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun 2021 sebesar 5,09 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan pada periode tahun 2020, maka terjadi kenaikan 4,04 persen atau sekitar Rp 16.781,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2020 berada pada level Rp 497.628,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2021 mencapai Rp 514.409,00 perkapita perbulan.

**Tabel I.10. Profil Kemiskinan Tahun 2021 Kota Madiun**

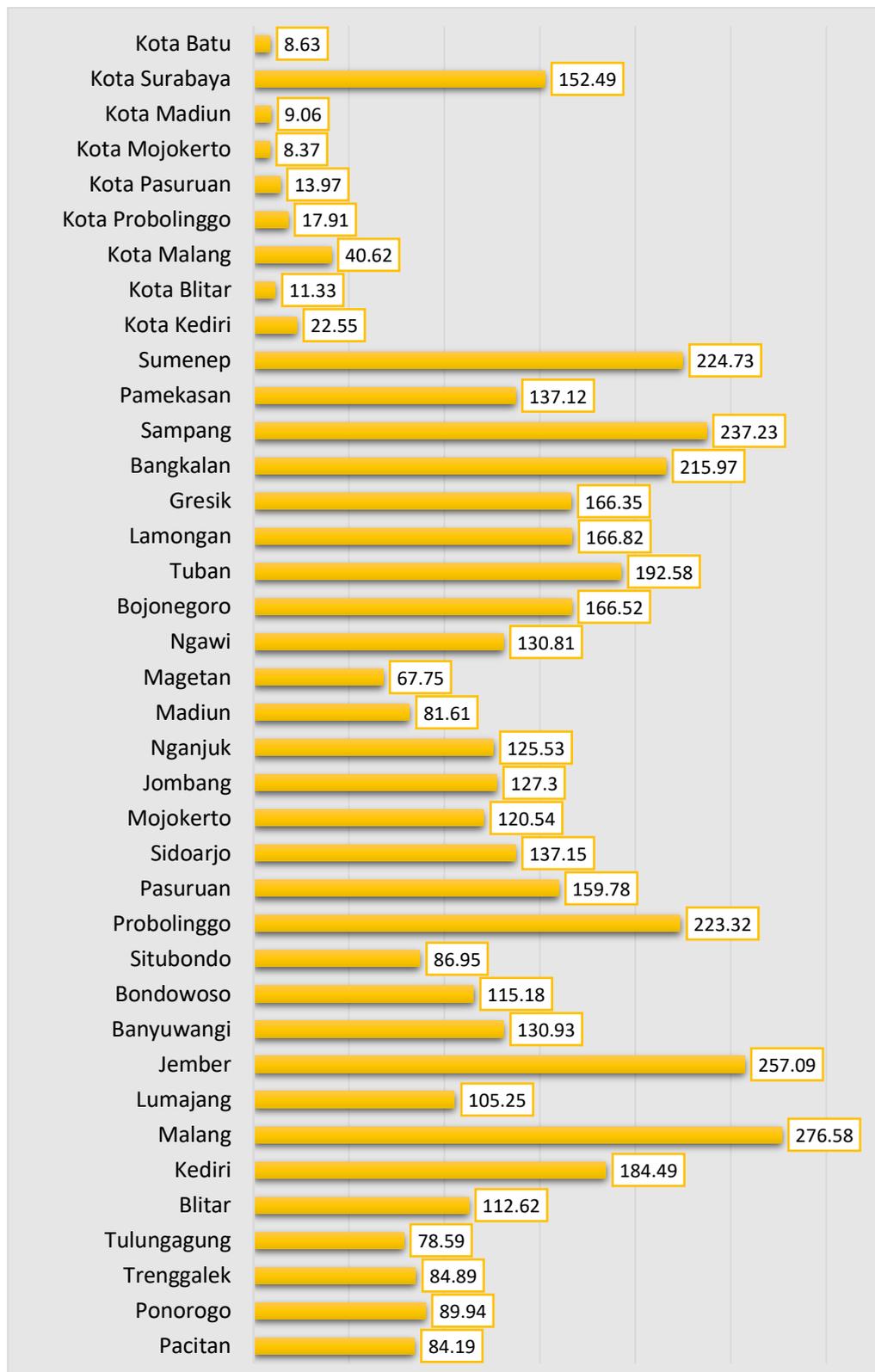
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	404.959,00	8.700	4,94
2018	446.525,00	7.920	4,49
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021*	514.409,00	9.060	5,09

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun kembali mengalami peningkatan jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan situasi dan kondisi ekonomi yang sangat berat. Perubahan yang sangat ekstrim terjadi di lapangan dengan adanya wabah Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan harga minyak dunia, ekspor menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.

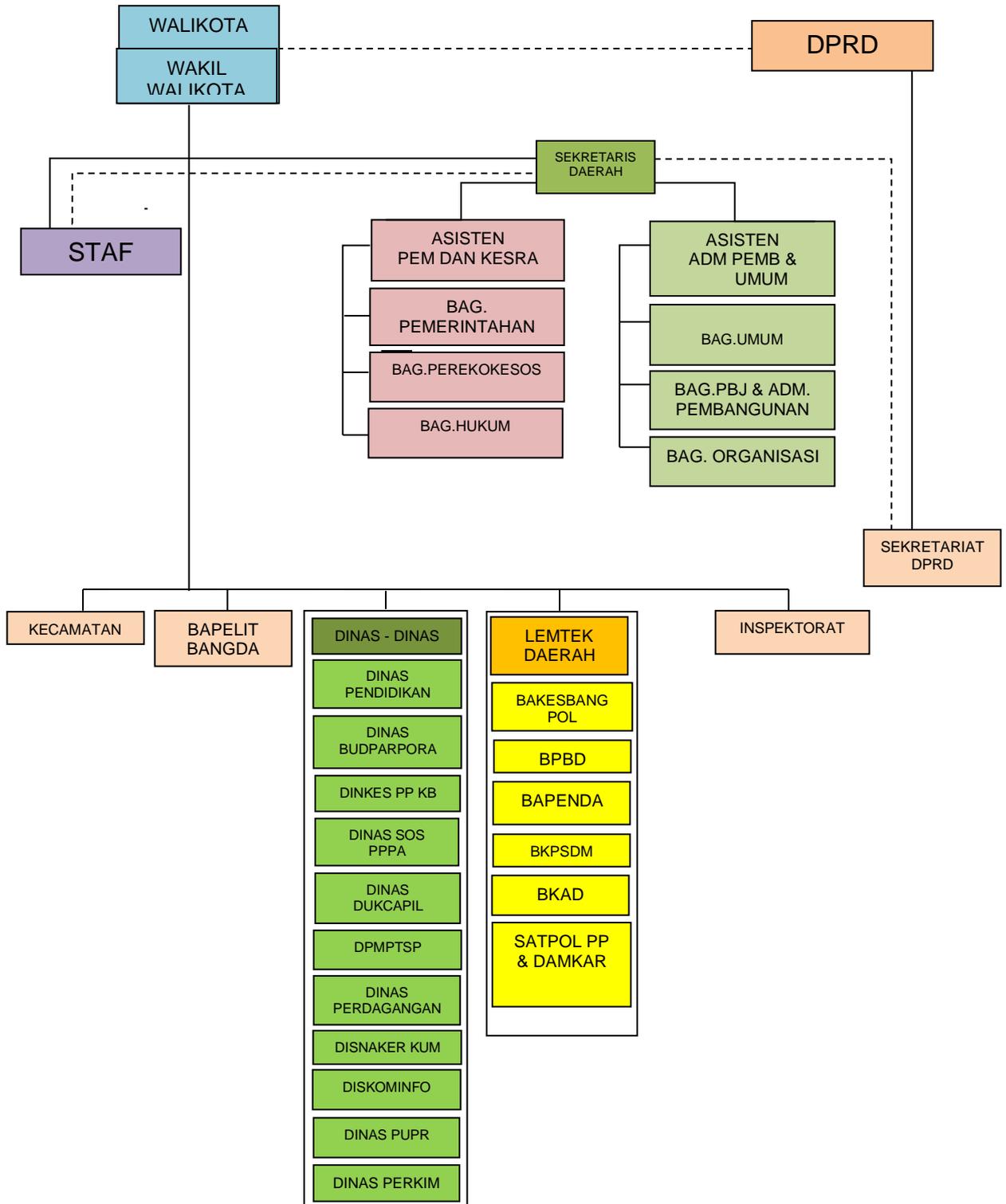
**Gambar I.9. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Ribu Jiwa)**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun



### C. Struktur Organisasi



#### D. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan, yaitu :

1. Masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia;
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan;
3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19;
4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan
5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar I.12. Lima Masalah Pokok Pembangunan Kota Madiun**





Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah.

Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Isu strategis dirumuskan dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

**Tabel I.9. Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
<b>Total</b>		100

Dari berbagai isu startegis kemudian dikelompokan dan di ranking sebagai berikut :

**Tabel I.10. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024**

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	<b>Sumberdaya manusia</b>	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	<b>Pembangunan Ekonomi</b>	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									



No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah	kawasan pertumbuhan ekonomi								
	Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan									
	Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal									
	Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri									
	Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi									
	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,									



No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
3	pariwisata dan jasa produktif lainnya									
	<b>Infrastruktur dan lingkungan</b>									
	Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu	90	85	90	85	85	85	86,5	2
	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat									
	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air									
Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup										
4	<b>Sosial kemasyarakatan</b>	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat	85	90	80	85	80	85	84,5	5
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup									
5	<b>Pemerintahan dan Tata Kelola</b>	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan,	85	90	80	85	85	85	85,25	4
	pembangunan berbasis Smart City									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.	akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi								
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional									

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:

### Gambar I.13. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, 2021



## F. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2021, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2021 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



## **P** BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.



## A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi Kota Madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019–2024 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan strategi **keberlanjutan** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program- program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut di tetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD**

<b>PERIODE</b>	<b>VISI</b>
<b>RPJPD 2005-2025</b>	<b>Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera</b>
<b>RPJMD 2019-2024</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera</b>
<b>Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD</b>	<b>Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP</b>

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna "Kemajuan" berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *goodgovernance*.



Makna "Sejahtera" berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

<b>VISI :</b> <b>"Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"</b>	
<b>M I S I</b>	<b>1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>
	<b>2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>
	<b>3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>
	<b>4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

### 3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD**

<b>Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera</b>		
<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>
1	<b>Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities
2	<b>Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan</b>	Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun</b>	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	<b>Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif 2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat

#### 4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4 Target Kinerja Sasaran Akhir RPJMD**

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (73)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4,1
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	82,85 (baik)
		Indeks Inovasi Daerah	1987

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	96,2%
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.69%



Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,4 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,14 Tahun
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,81 Tahun
3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,19

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,26%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	2,16%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	0,58%

Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target RPJMD 2021
4.2.1	Pengurangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,46%
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 74,30 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	76,15%

## B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2021 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks Reformasi Birokrasi	(B) 67
2	Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Livable city (Indeks kenyamanan kota)	87,78
3	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia	80,92
		Indeks pembangunan gender	94,40
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif	Indeks pembangunan ekonomi inklusif	6,38
5	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks ketentraman	76,95
		Indeks Gini	0,38



No.	Program	Anggaran
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 561,505,718,803.00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 119,094,672,764.00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 572,110,560.00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1,959,105,000.00
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 197,401,588,778.00
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 235,589,050.00
7.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 178,376,700.00
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1,130,949,900.00
9.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 300,956,040.00
10.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 2,727,576,000.00
11.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp. 257,495,200.00
12.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 12,299,394,650.00
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi	Rp. 22,274,002,000.00
14.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 20,857,814,000.00
15.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 19,966,147,160.00
16.	Program Penyelegaraan Jalan	Rp. 58,330,391,462.00
17.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 500,000,000.00
18.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,280,982,460.00
19.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 1,292,650,000.00
20.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 7,283,612,424.00
21.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 19,023,618,740.00



No.	Program	Anggaran
1	2	3
22.	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp. 85,000,000.00
23.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 120,000,000.00
24.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4,683,621,000.00
25.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1,285,321,000.00
26.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 1,377,859,000.00
27.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 2,210,456,099.00
28.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1,508,844,750.00
29.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 9,360,726,880.00
30.	Program Penanganan Bencana	Rp. 344,885,800.00
31.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 103,194,134.00
32.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 303,007,740.00
33.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 225,292,045.00
34.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 196,558,420.00
35.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 113,615,510.00
36.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 266,276,000.00
37.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 81,739,101.00
38.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 418,950,040.00
39.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 272,466,690.00
40.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1,682,439,130.00
41.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 750,310,000.00
42.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 148,050,000.00
43.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 829,985,000.00
44.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 563,351,320.00



No.	Program	Anggaran
1	2	3
45.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 407,053,895.00
46.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 1,287,926,000.00
47.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 211,622,000.00
48.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 296,130,000.00
49.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 459,215,000.00
50.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1,608,737,600.00
51.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 29,653,000.00
52.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 478,050,000.00
53.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 171,200,400.00
54.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 131,363,000.00
55.	Program Perencanaan Lingkungan	Rp. 397,958,000.00
56.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1,242,680,365.00
57.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 125,500,000.00
58.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 257,127,000.00
59.	Program Pembinaan dan Pengawasan	Rp. 336,516,400.00



No.	Program	Anggaran
1	2	3
	terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
60.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 654,550,000.00
61.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 85,000,000.00
62.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 8,576,232,000.00
63.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 228,148,160.00
64.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 559,472,520.00
65.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 347,749,070.00
66.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 8,363,009,965.00
67.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4,619,278,000.00
68.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 9,760,450,600.00
69.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 313,278,000.00
70.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 195,502,695.00
71.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 373,118,200.00
72.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 876,549,000.00
73.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 525,800,000.00
74.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 83,200,000.00
75.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 13,500,000.00
76.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 700,000,000.00
77.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 3,511,442,880.00
78.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 1,924,765,097.00
79.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp. 123,886,145.00



No.	Program	Anggaran
1	2	3
80.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 200,000,000.00
81.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 265,000,000.00
82.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 459,149,000.00
83.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 328,410,595.00
84.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1,225,410,000.00
85.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 436,331,945.00
86.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 388,870,000.00
87.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 8,242,965,872.00
88.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 77,966,680.00
89.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 342,050,000.00
90.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 379,622,600.00
91.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 9,032,124,260.00
92.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1,405,519,892.00
93.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 12,826,552,255.00
94.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1,579,333,325.00
95.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,452,140,380.00
96.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 727,489,507.00
97.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 60,340,673,185.00
98.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3,748,942,400.00
99.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 616,777,500.00
100.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 2,032,523,200.00
101.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2,648,819,070.00



No.	Program	Anggaran
1	2	3
102.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 848,332,295.00
103.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1,019,621,160.00
104.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22,986,153,395.00
105.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 12,144,724,510.00
106.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1,056,048,090.00
107.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 432,964,524.00
108.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 265,408,050.00
109.	Program Peningkatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 871,058,100.00
110.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 272,985,000.00
111.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 536,633,650.00
112.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1,454,339,864.00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 1.275.325.306.646.00</b>



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

## A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran**

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	$X \geq 100 \%$	Sangat Baik
2	$85 \% \leq X < 100 \%$	Baik
3	$60 \% \leq X < 85 \%$	Cukup Baik
4	$X < 60 \%$	Kurang Baik

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

## 2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :



**Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	67 (B)	66,25	98,88
2.	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	87,78	89,40	100,42
3.	Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	80,92	81,25	100,40
		Indeks Pembangunan Gender	94,40	94,42	100,02
4.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,38	6,69*	104,85
5.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	76,95	78,74	102,32
		Indek Gini	0,38	0,345	109,21





**Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,38	6,69	104,85
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	76,95	78,74	102,32
	Indek Gini	0,38	0,345	109

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun, KEMENPANRB dan BPS

### 3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 disajikan sebagai berikut :



**1. Misi Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran**

**Pada Misi 1 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :**

**Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2020 (n-1)	2021 (n)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	<b>70,01 (BB)</b>	65,55 (B)	66,25 (B)

Sumber : KEMENPANRB

**Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	66,25 (B)	94,62

Sumber : KEMENPANRB



**Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan  
Realisasi Provinsi dan Nasional**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	66,25 (B)	BB	N/A

Sumber : KEMENPANRB

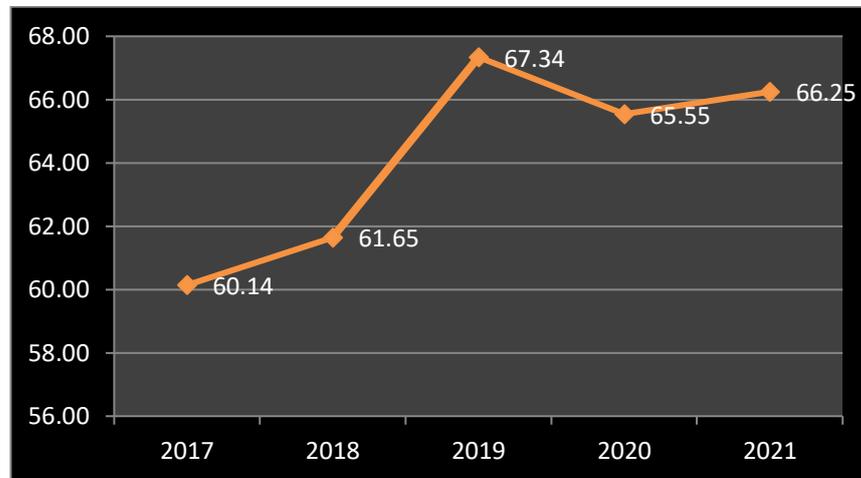
### Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun  
Tahun 2016-2020**



Sumber : Inspektorat Kota Madiun, Kementerian PANRB

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan PMPRB Tahun 2020 terdapat perbedaan dalam komposisi penilaiannya, jika dulu hanya terdiri dari 2 komposisi yaitu Faktor Pengungkit (60%) dan Hasil (40%), tapi di tahun 2020 terdapat perubahan di komposisi Faktor Pengungkit sebagai berikut :

- **Mandatory (20%):** poin-poin penilaian dalam *mandatory* adalah poin-poin penilaian dalam faktor pengungkit yang lama, bedanya jika dulu bobotnya 60% sekarang berubah menjadi 20%.
- **Kewajiban K/L (10%):** adalah penilaian oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang hasilnya antara lain Penilaian Arsip (oleh lembaga kearsipan), indeks kinerja penyerapan anggaran (oleh Kemenkeu), Indeks Pengelolaan Aset (oleh Kemenkeu), Indeks APIP (oleh BPKP), Indeks SPIP (oleh BPKP), dsb.
- **Reform (30%):** hasil perubahan yang sudah dicapai oleh perangkat daerah. Di samping itu juga dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga perlu adanya adaptasi dalam berbagai sektor.



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 66,25 kategori "B" dengan capaian kinerja sebesar 98,88%. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7. Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot	2021
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>		
	<b>I. Pemenuhan</b>	20,00	13,53
	<b>II. Hasil Antara Area Perubahan</b>	10,00	5,21
	<b>III. Reform</b>	30,00	16,06
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>34,80</b>
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,90
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,53
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,80
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,23
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>31,46</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>66,26</b>

Sumber : Kementerian PANRB



Sedangkan untuk Hasil Antara dari masing-masing *leading sector* adalah sebagai berikut :

Tabel. III.8. Hasil Antara Penilaian Reformasi Birkorasi dari Kementerian/Lembaga

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	130,50 (Buruk)	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	ASN Profesional	0-100	47,39 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
3.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	3,06 (Baik)	Kementerian PANRB
4.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	23,79 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,17	Kementerian PANRB
6.	Kapabilitas APIP	0-5	1 (Initial)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Maturitas SPIP	0-5	3 (Terdefinisi)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	78,47 (Zona Kuning)	Ombudsman RI
9.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	59,01 (Cukup)	Arsip Nasional Republik Indonesia

Sumber : Kementerian PANRB

Capaian dari komponen hasil Pemerintah Kota Madiun adalah :

Tabel. III.9. Capaian Komponen Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	70,01 (Predikat BB)	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	95,25	Kementerian PANRB



No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	88,01	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	82,61	SPI Internal oleh KPK

Sumber : Kementerian PANRB

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Internal Organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
2. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Hasil antara dari Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa masih kurang dan Kualitas Pengelolaan Arsip masih dengan kategori cukup



2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan dengan optimal
3. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih rendah
5. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
6. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
7. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8. Ukuran kinerja eselon III, IV, dan individu, serta mengukur dan mengaitkannya dengan remunerasi/penghargaan
9. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan workshop peningkatan kapasitas agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.021/122/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Peningkatan pengelolaan arsip dengan melakukan pengawasan kearsipan interna terhadap perangkat daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.



Adapun nilai hasil pengawasan Kearsipan internal tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. III.10. Hasil Pengawasan

NO.	INSTANSI	NILAI	KATEGORI
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62	B (BAIK)
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	62	B (BAIK)
3.	Dinas Pendidikan	58,5	CC (CUKUP)
4.	Dinas Perubangan	55,25	CC (CUKUP)
5.	Dinas Lingkungan Hidup	54	CC (CUKUP)
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	53,75	CC (CUKUP)
7.	Dinas Tenaga Kerja. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	52,75	CC (CUKUP)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62	CC (CUKUP)
9.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	58,5	CC (CUKUP)
10.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	55,25	CC (CUKUP)

Sumber : Inspektorat Kota Madiun

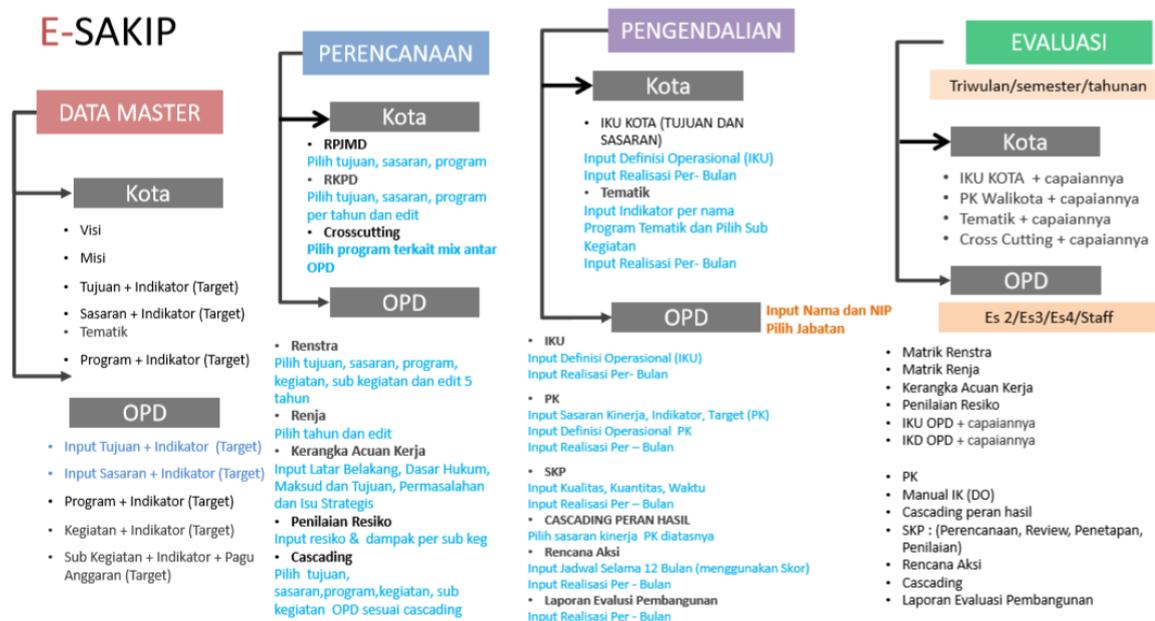
- Di samping itu dengan menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional <https://jkn.go.id/index.php/dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-kota-madiun> . JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

Gambar III.2. Aplikasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional



4. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.
5. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
6. Melakukan pengembangan esakip dengan mengintegrasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Untuk tahun 2022 ini telah direalisasikan aplikasi <https://skp.madiunkota.go.id/> yang juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

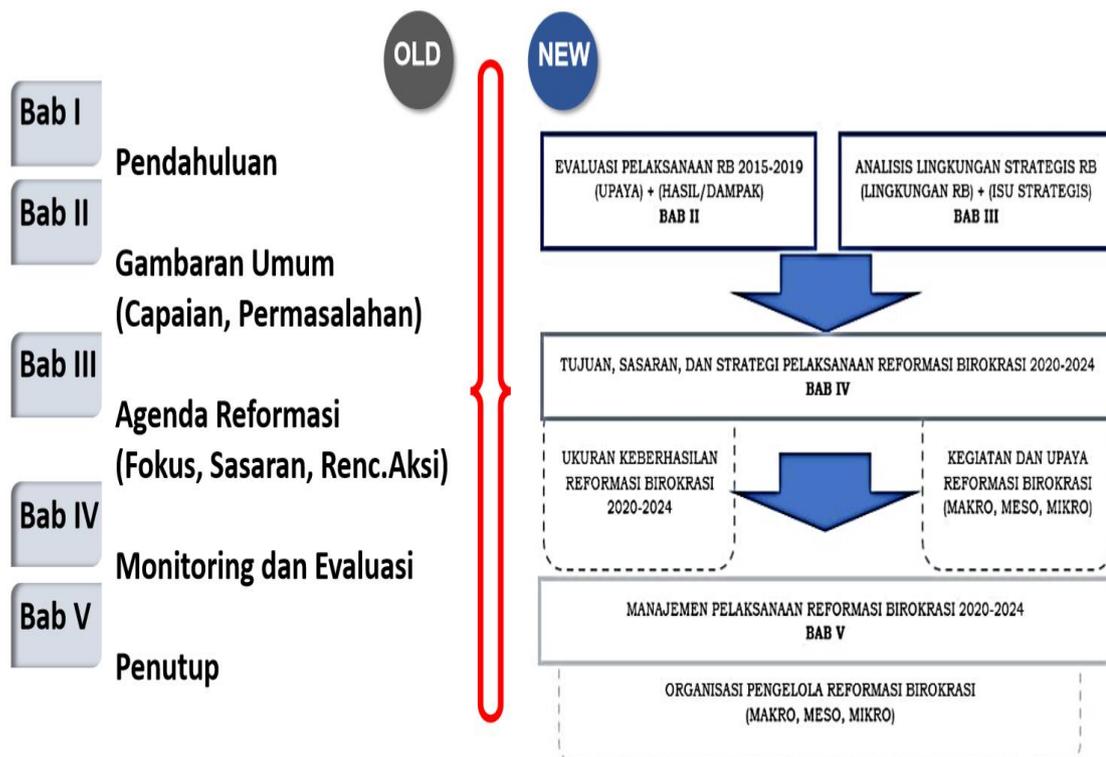
Gambar III.3. Skema Perubahan e-sakip



- Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusunan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyusunan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- Melakukan pembinaan terhadap unit pelayanan dalam rangka persiapan terhadap pengusulan Unit Pelayanan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

10. Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
11. Penyusunan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun. Adapun perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Gambar III.4. Skema Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi



**Sasaran Strategis “Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

Tabel. III.11. Hasil Pengawasan

Sasaran 1		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	BB (73)	B(70,97)	97,22
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	3,3805 (Sangat Tinggi)*	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,83	3,06	108,13
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	82,85	86,456 (Baik)	104,35
		Indeks Inovasi Daerah	1892	2693	142,34

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

\*Data Tahun 2020

#### **A. Sasaran 1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah :**

##### *1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80 - 90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	<b>Sangat Baik</b> , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60 -70	<b>Baik</b> , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5.	CC	>50 -60	<b>Cukup (Memadai)</b> , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>50 -60	<b>Kurang</b> , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>50 -60	<b>Sangat Kurang</b> , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

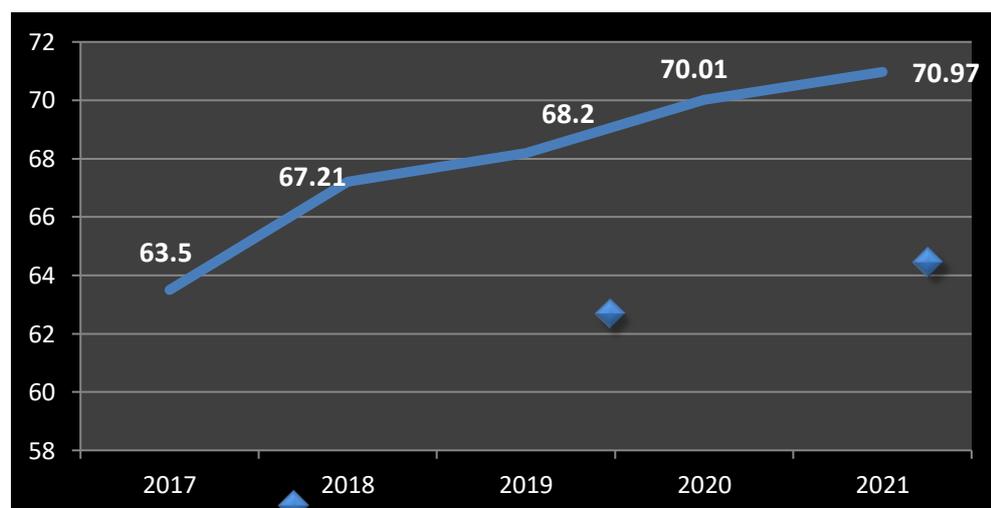
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 31 Maret 2021 Nomor : B/349/AA.05/2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 70,01 dengan Predikat BB. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2016,2017,2018,2019 dan 2020 capaian kerjanya mengalami kenaikan. Dari hasil capaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut pada tahun 2020 merupakan tahun pertama Pemerintah Kota Madiun mendapat Predikat dengan nilai sebesar 70,01. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 95,90%.

Gambar III.5. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : KEMENPANRB



Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penetapan RPJMD Perubahan dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
3. Melakukan pendampingan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 beserta dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran
6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi skema dan esakip
7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaporkan Tahun 2021, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/ Biro Organisasi, dan study banding
9. Melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis kinerja yaitu <https://skp.madiunkota.go.id/>



## 2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai EKPPD Tahun 2020 terhadap hasil LPPD Tahun 2019 yang sedianya diumumkan bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah tanggal 12 April 2021, dikarenakan kondisi pandemi serta masa transisi perubahan nomenklatur yang mendasari pelaporan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, maka belum dapat dirilis sehingga capaian kerjanya masih menggunakan data tahun lalu, yaitu Status Kinerja **Sangat Tinggi** dengan **Skor 3,3805**.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah.

Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran (TPT)	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR
1	IKK Outcome	105
2	IKK Output	488
3	IKK Fungsi Penunjang	18

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 meraih nilai 3,3850 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun 2016 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari masyarakat.

Adapun Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.6. Tabel Nilai LPPD tahun 2016-2020**



Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun

\*Data Tahun 2020

### 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka Nilai indeks SPBE Tahun 2021 sebesar 3,06 dengan predikat BAIK

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
3. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
4. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
5. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai

Faktor Penghambat :

1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
2. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)
3. Kompetensi SDM TIK belum mencukupi sesuai kebutuhan

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur
2. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK
4. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

## **B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik :**

### *1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun*

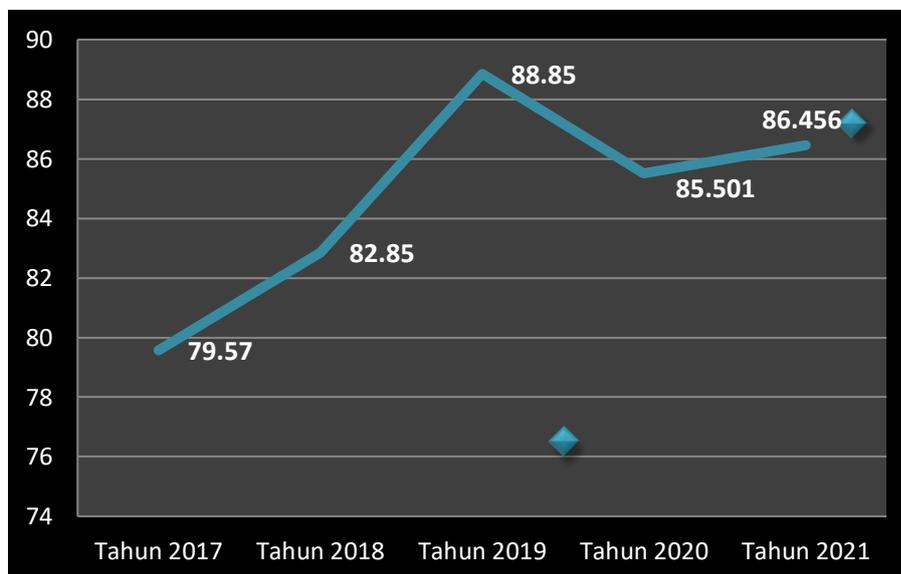
Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2021, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 86,456 dengan kategori nilai Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2020 dengan nilai sebesar 85,501 dengan capaian kinerja atas target sebesar 104%.

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.7. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun



Trend Indeks Kepuasan Masyarakat mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020 terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi Auditee dan Atuditor dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional Nomor  $\frac{80/6/401.011/2019}{02/BSN/MoU/IV/2019}$  tentang Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian)



6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2021 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

## 2. Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

- Sangat Inovatif;
- Inovatif;
- Kurang Inovatif; serta
- Tidak Dapat Dinilai.

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) / IGA dilakukan secara digital melalui sistem IGA Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan menghitung hasil input dari Indeks Satuan Inovasi Daerah yang terdiri dari 20 (dua puluh) indikator dan nilai Profil Satuan Pemerintah Daerah dengan 16 (enam belas) indikator.

Adapun faktor pendorong peningkatan skor yaitu:

- a) Wilayah geografis kota Madiun relatif kecil sehingga memiliki kemudahan dalam aksesibilitas;
- b) Dukungan fasilitas sarpras digital yang memadai;
- c) Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia dari Perangkat Daerah yang cukup tinggi;
- d) Komitmen dari masing-masing Perangkat Daerah untuk menghasilkan inovasi;



- e) Adanya *punishment* bahwa IID berdampak pada besaran pemberian TPP bagi ASN pemerintah daerah, yakni untuk daerah yang IID-nya masuk kategori Kurang Inovatif maka TPP akan dikurangi sebesar 3%.

Tahun 2021, dalam pelaksanaan IGA 2021, Bidang Litbang Kota Madiun selaku koordinator IGA 2021 di Kota Madiun melakukan beberapa hal seperti berikut :

- a) Sosialisasi persiapan IGA 2021 yang diikuti dalam INOTEK Award 2021 Litbangprov Jawa Timur dengan narasumber dari Balitbangprov Jawa Timur yang dilaksanakan pada Rabu/21 April 2021 dengan mengundang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- b) Bimbingan Teknis Simulasi Pengisian Aplikasi IGA 2021 melalui *zoommeeting* yang difasilitasi oleh Badan Litbang Kemendagri pada Selasa/ 3 Agustus 2021;
- c) *Webinar Bench Marking* IGA 2020 Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota oleh Badan Litbang Kemendagri pada Rabu/ 4 Agustus 2021;
- d) Koordinasi dengan operator IGA Perangkat Daerah melalui media sosial (WA grup IGA Kota Madiun);
- e) Pendampingan ke perangkat daerah pada tanggal 27 Juli dan 6 Agustus 2021;
- f) Konsultasi dan koordinasi dengan Balitbangprov maupun Badan Litbang Kemendagri;
- g) Monitoring peng-input-an proposal IGA mulai dari 8 Juni s.d 17 September 2021;
- h) Optimalisasi pelaporan inovasi daerah dari Perangkat Daerah melalui Pengajuan Nota Dinas tanggal 31 Agustus 2021 Nomor : 070/2454/401.204/2021 perihal Laporan Progres Input Data *Innovative Government Award* (IGA) 2021 Dalam Rangka Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

## Penilaian IGA Tahun 2020 mempunyai perbedaan sebagai berikut :

### 1. IGA 2020

Pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 100-4672 tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020, Kota Madiun mendapatkan nilai IID : 1.892 dengan kategori Kota Sangat Inovatif. Tahun 2020 melalui sistem IGA 2020 dikirimkan 30 (tiga puluh) proposal inovasi dengan data dukungannya.

Tahun 2020 penilaian IID didapatkan dari akumulasi total Nilai Indikator Inovasi Daerah, artinya setiap proposal inovasi apabila telah didukung dengan data dukung indikator maka proposal tersebut memberikan sumbangsih atas nilai akumulasi.

Dengan kategorisasi sebagai berikut :

**Tabel III.19 Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah  
Tahun 2020 :**

<b>Kategori Skor Sangat Inovatif</b>	1001 sd tak hingga
<b>Inovatif</b>	501 sd 1000
<b>Kurang Inovatif</b>	1 sd 500
<b>Tidak Dapat Dinilai</b>	0

Sumber : Bappelbangda Kota Madiun

### 2. IGA 2021

Pada tahun 2021 sistem penilaian berubah dari akumulasi total nilai menjadi Skor Total (Skor Profil Pemda ditambah Skor Inovasi Daerah) dibagi Skor Total Maksimum dikali 100, atau secara rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

$$\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata-rata ISI}$$

**ISP** adalah Indikator Satuan Pemda

**ISI** adalah Indikator Satuan Inovasi

**Skor Total Maksimum** adalah 250



Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Satuan Pemda sebesar 40% ;
- Inovasi Daerah sebesar 60%.

Skala IID adalah 0 s.d. 100

Dengan kategorisasi atas IID sebagai berikut :

Tabel III.20 Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah  
Tahun 2021 :

<b>Kategori Skor Sangat Inovatif</b>	60,00-100,00
<b>Inovatif</b>	30,00-59,99
<b>Kurang Inovatif</b>	0,01-29,99
<b>Tidak Dapat Dinilai</b>	0

Sumber : Bappelibangda Kota Madiun

Sampai dengan batas akhir pelaporan IGA 2021 di SIM IGA 2021 Badan Litbang Kemendagri dilaporkan Profil Satuan Pemerintah Daerah dan 24 (dua puluh empat) proposal inovasi daerah yang telah dilengkapi dengan data dukung indikator khususnya pada 5 (lima) indikator wajib Inovasi Daerah, yaitu :

- i. Regulasi Inovasi Daerah ;
- ii. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah ;
- iii. Kecepatan Inovasi ;
- iv. Kemanfaatan Inovasi ;
- v. Kualitas Inovasi Daerah.

Dari input tersebut, nilai total capaian nilai atas kecukupan data dukung indikator inovasi daerah sebagai tolok ukur kematangan inovasi adalah sebagai berikut :

Tabel III. 21. Skoring Indikator Inovasi Daerah IGA 2021

No	Indikator Inovasi	Skoring total per indikator	Jumlah Proposal yang Tidak Disertai Data Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah*	148	0
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah*	102	0
3	Dukungan Anggaran	204	6
4	Penggunaan IT	96	3
5	Bimtek Inovasi	142	0



No	Indikator Inovasi	Skoring total per indikator	Jumlah Proposal yang Tidak Disertai Data Dukung
6	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	127	0
7	Jejaring Inovasi	50	0
8	Replikasi	144	0
9	Pedoman Teknis	72	9
10	Pelaksana Inovasi Daerah	102	0
11	Kemudahan Informasi Layanan	98	0
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	96	4
13	Keterlibatan aktor inovasi	69	0
14	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	74	8
15	Online Sistem	76	1
16	Kecepatan Inovasi*	174	0
17	Kemanfaatan Inovasi*	325	0
18	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	117	4
19	Sosialisasi Inovasi Daerah	122	3
20	Kualitas Inovasi Daerah*	355	0
	Jumlah	2.693	

\* Adalah indikator yang wajib ada data dukungnya apabila inovasi tersebut hendak dilaporkan.

Total capaian indikator inovasi daerah yang dinilai dari kecukupan data dukung dari Perangkat Daerah didapatkan nilai inovasi daerah sebesar 2.693 (dari potensi nilai maksimal 3.600, yakni nilai maksimal per proposal : 150 dikalikan 24 proposal).

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mendapat 1.892, maka capaian tahun 2021 meningkat sekitar 42,34%. Sedangkan capaian nilai atas kecukupan data dukung indikator Profil Pemda dapat diamati dari tabel berikut :



**Tabel III.22. Profil Pemda Kota Madiun IGA 2021**

NO	Indikator	Informasi	Keterangan	Nilai	Skala Skoring			
1	<b>Visi Misi</b>	<p>Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera</p> <p>Misi: 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun</p>		1	0	1	2	3
2	<b>Tingkat Lembaga Kelitbangan</b>	Unit litbang ditangani setara eselon III		6	0	3	6	9
3	<b>APBD Tepat Waktu</b>	Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut		6	0	2	4	6
4	<b>Kualitas Peningkatan Perizinan</b>	20,59%	2019 : 2803 2020 : 3380	5	0	5	10	15
5	<b>Jumlah Pendapatan Perkapita</b>	-2,61%	2019 : 79.700.000 2020 : 77.620.000	2	0	1	2	3
6	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	-4,36%	2019 : 3.96 2020 : 8.32	0	0	3	6	9
7	<b>Jumlah Peningkatan Investasi</b>	-66,18%	2019 : 968.702.041.674 2020 : 327.632.796.023,96	0	0	3	6	9



NO	Indikator	Informasi	Keterangan	Nilai	Skala Skoring			
8	<b>Jumlah Peningkatan PAD</b>	-1,35%	2019 : 252.048.754.413, 59	0	0	2	4	6
			2020 : 248.656.192.759, 32					
9	<b>Opini BPK</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion)		3	0	1	2	3
10	<b>Nilai Capaian Lakip</b>	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B Tahun terakhir		2	0	1	2	3
11	<b>Penurunan Angka Kemiskinan</b>	-0,63%	2019 : 4.35	2	0	2	4	6
			2020 : 4.98					
12	<b>Jumlah Inovasi Daerah</b>	by sistem	48	6	0	3	6	9
13	<b>Nilai IPM</b>	0,04%	2019 : 80.88	2	0	2	4	6
			2020 : 80.91					
14	<b>Penghargaan Bagi Inovator</b>	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif serta menerapkan ide inovasinya		3	0	1	2	3
15	<b>Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi</b>	1 - 3 Penelitian / Kajian		2	0	2	4	6
16	<b>Roadmap SiDA</b>	telah membuat dokumen SIDA dan ditetapkan dalam Perkada	Road Map Smart City	3	0	1	2	3

	tidak mendapat nilai (nilainya : 0)	: 3 indikator
	nilai minimal	: 4 indikator
	Nilai menengah	: 5 indikator
	nilai tertinggi	: 4 indikator

Dari tabel tersebut, total nilai untuk Profil Pemda hanya mencapai 43 (dari nilai maksimal 100).

Dari akumulasi nilai Indikator Inovasi Daerah (2.693) dan nilai Profil Pemda (43), dengan menggunakan rumus Penghitungan Indeks Inovasi Daerah 2021 diatas, secara penilaian manual didapatkan indeks 62,08 (Kategori Pemda Sangat Inovatif).

**Tabel III.23. Penilaian Manual IGA 2021**

Uraian	Skor SIM IGA	skor maksimal	%	proporsi penilaian	indeks
<b>profil pemda (ISP)</b>	43	100	43	40%	17,20
<b>indikator inovasi daerah (ISI)</b>	2.693	3.600	74,81	60%	<u>44,88</u>
Penilaian Indeks ( <i>self assessment</i> ) tipe 1 (40% nilai profil pemda, 60% nilai indicator inovasi daerah)					<b>62,08</b> <b>Kategori Sangat Inovatif</b>

Atau dengan perhitungan :

$$\text{ISP} = 43$$

$$\text{ISI} = 2.693$$

$$\text{Rata-rata ISI} = \frac{2.693}{24} = 112,21$$

$$\text{Skor Total} = 43 + 112,21 = 155,208$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Inovasi Daerah/ IID} &= \text{Skor Total/ Skor Total Maksimum} \times 100 \\ &= 155,208/250 \times 100 \\ &= 62,08 \end{aligned}$$

Namun demikian, penilaian indeks IID dalam SIM IGA 2021 yang kemudian disahkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 002.6-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Kota Madiun hanya mendapatkan indeks 52,99 dengan kategori Kota Inovatif.



**2. Misi Kedua : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran**

**Pada Misi 2 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :**

**Tabel III.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2020 (n-1)	2021 (n)
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,01	86,67	89,40

Sumber : Bappelitbangda

**Tabel III.25. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,01	89,40	95,85%

Sumber : Bappelitbangda



**Tabel III.26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,40	-	N/A

Sumber : Bappelitbangda

### Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep livable city terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang livable.



Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan *livable* dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar *livable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

#### Indikator Umum

##### I. Sarana Prasarana

1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
2. Kualitas Angkutan/ Transportasi



3. Kondisi Jalan
  4. Pedestrian
  5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
  6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
  7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
  8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
  9. Listrik
  10. Ketersediaan Air Bersih
  11. Kualitas Air Bersih
  12. Telekomunikasi
- II. Ekonomi
1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
  2. Biaya Hidup
- III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan
1. Tata Kota
  2. RTH
  3. Kebersihan
  4. Persampahan
  5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air
- IV. Kehidupan Sosial
1. Kriminalitas
  2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
  3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
  4. Akses Informasi Pelayanan Publik
  5. Keamanan



## Indikator Khusus

### I. Sarana Prasarana

1. Kantong Parkir
2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
5. Jaringan Internet (WIFI)

### II. Ekonomi

1. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah

### III. Kehidupan Sosial

1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif

### IV. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum

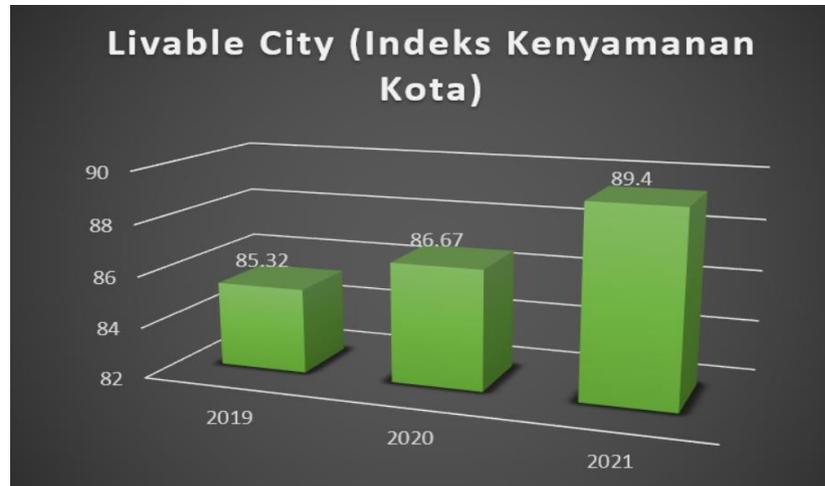
### V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan

### VI. Kondisi Politik

### VII. Smart City

### VIII. Kualitas Hidup Penduduk

**Gambar III.8. Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)  
Tahun 2019-2021**



Realisasi kinerja Indeks Livable City Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 belum rilis, sehingga data yang digunakan adalah data sementara yaitu data realisasi tahun 2020. Target Tahun 2021 adalah 87,78, di tahun 2021 realisasi kinerjanya sebesar 89,40 dengan capaian sebesar 100,42%, sedangkan di tahun 2019 realisasi sebesar 86,67. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

Sasaran Strategis “Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	98,06	97,99	99,93
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,69	58,99	102,25

Sumber Data : Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun



## A. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota :

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2021 sebesar 97,99%. Walaupun secara target Indeks Infrastruktur tidak tercapai, tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 96,85 maka mengalami kenaikan sebesar 1,14 poin.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong yang mempengaruhi

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.



Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan Indeks Infrastruktur :

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
- 4) Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

## **B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan



informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2021 sebesar 58,99. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Tahun 2021 yaitu 52,61, IKU Tahun 2021 yaitu 83,78 sedangkan IKTL Tahun 2021 yaitu 24,11.

Perhitungan IKLH Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan formula baru sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKTL})$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2020 yaitu 65,42 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2021 adalah 58,99, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena memang perhitungan IKA, IKU dan IKTL menggunakan rumus yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2021 berada dalam posisi "sedang". Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.



Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

- a. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
- b. Penambahan RTH yang menunjang peningkatan indeks kualitas lahan

Faktor penghambatnya yaitu :

1. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
3. Pada awal tahun 2021 Kota Madiun mengalami banyak kegiatan pembaruan struktur yang menyebabkan adanya penebangan pohon lindung tepi jalan, sehingga nilai tutupan lahan karena tajuk vegetasi menjadi berkurang.
4. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH oleh OPD terkait
- d. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait.
- e. Optimalisasi pengelolaan sampah dan B3
- f. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
- g. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup



### 3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran

Pada Misi 3 Tujuan 1 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel III.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2020 (n-1)	2021 (n)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	80,91	81,25
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,38	94,42

Sumber : BPS Kota Madiun

**Tabel III.28. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	81,25	98,66
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	94,42	99,90

Sumber : BPS Kota Madiun

**Tabel III.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	81,25	72,14	72,29
	Indeks Pembangunan Gender	94,42	91,67	N/A

Sumber : BPS Kota Madiun

### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai



lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel III.30. IPM Kota Madiun**

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI
2017	72,48	14,20	11,10	15.415
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020*	72,81	14,40	11,14	16.018
2021**	72,83	14,41	11,37	16.095

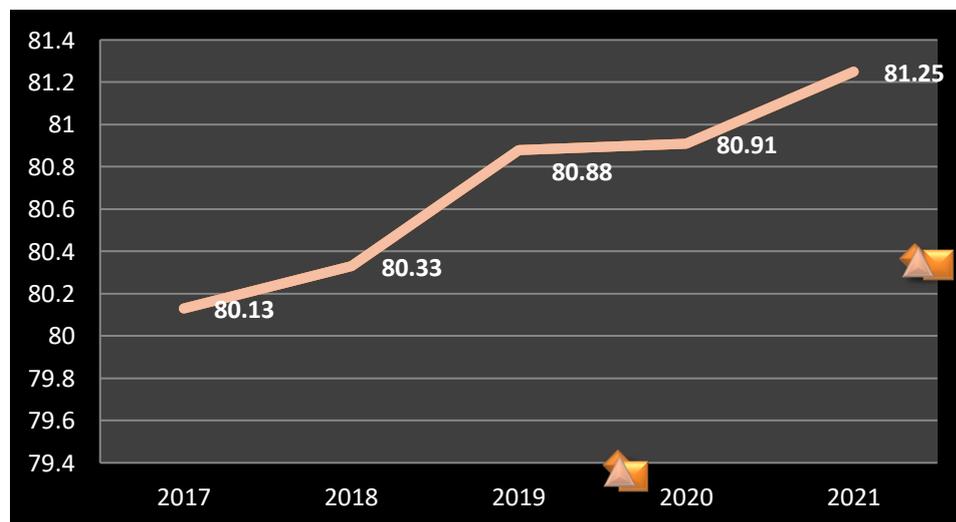
Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 72,83 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2021 tercatat sebesar 14,41, lebih tinggi 0,07 persen dibanding sebelumnya yaitu 14,40, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2021 mencapai 11,37, atau meningkat 2,06 persen dibanding tahun lalu. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada tahun 2021 mencapai Rp. 16.095.000 atau meningkat 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 16.018.000.

Selama 2017 hingga 2021, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil yaitu 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2021 sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen (meningkat 0,34 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 100,40% dari target Tahun 2021.

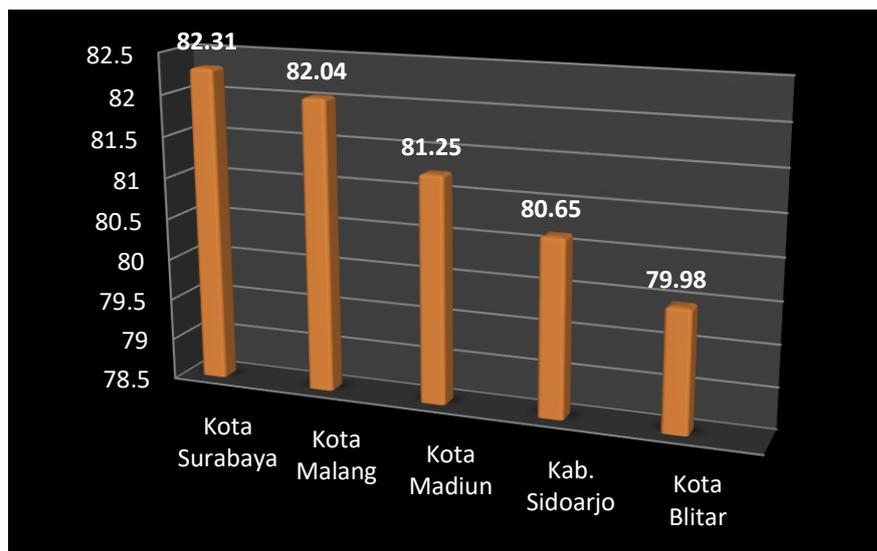
**Gambar III. Perkembangan IPM Kota Madiun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2021

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2021 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 81,25. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2021 masih bertahan menjadi IPM berkategori "sangat tinggi". Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

**Gambar III. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021  
5 (lima) besar Kab/Kota se Jawa Timur**



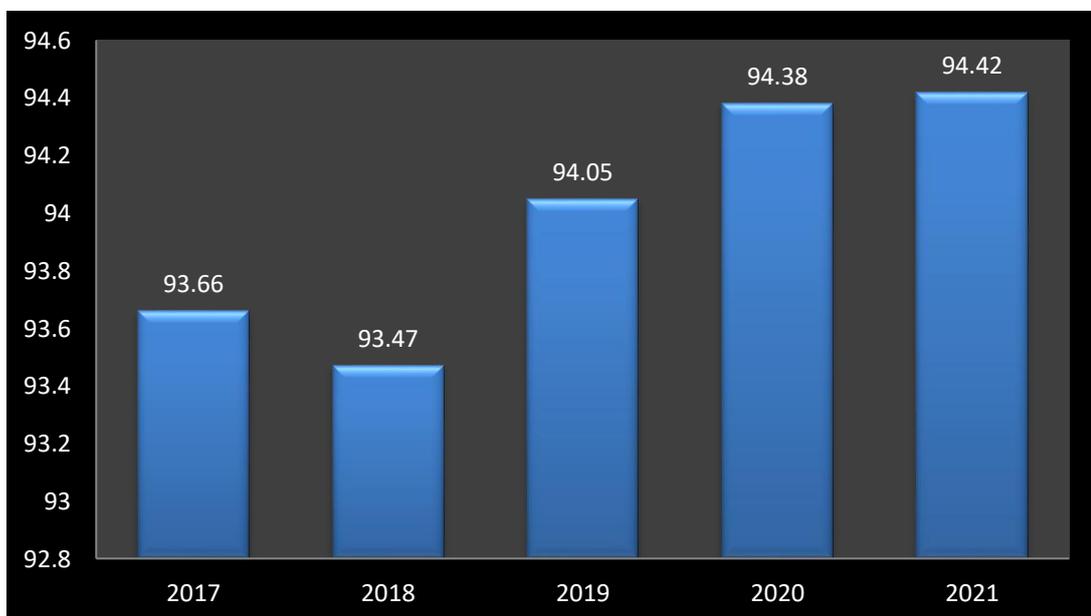
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2021

## 2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Gambar III. Indeks Pembangunan Manusia (IPG) Kota Madiun  
Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Kota Madiun

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 94,42. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

**Sasaran Strategis “Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

Sasaran 1		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,41	14,41	100
		Rata-rata Lama Sekolah	11,37	11,14	102,06
3.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,83	72,83	100
3.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,19	77,18*	100,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

\*2020

## A. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat :

### 1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 1,46 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

**Gambar III. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun Tahun 2017-2021**



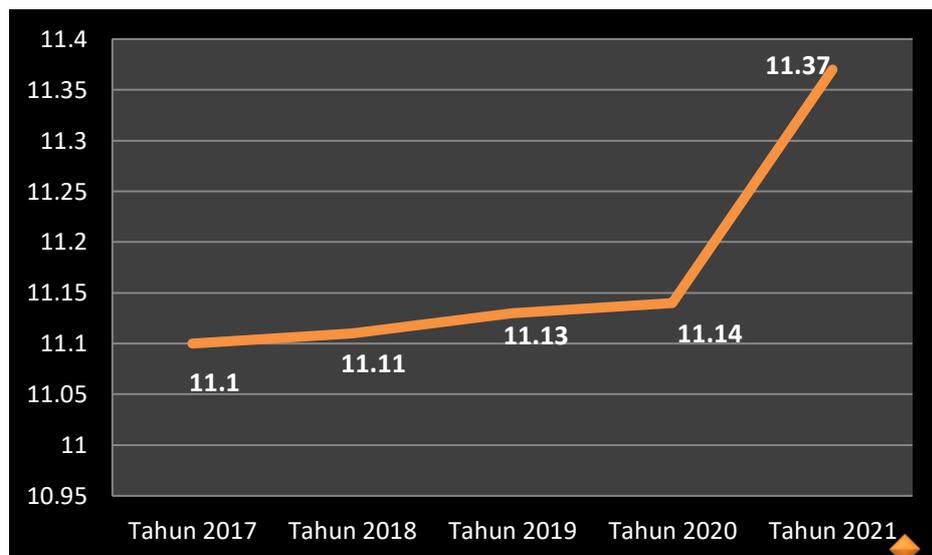
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

### 2. Rata-Rata Lama Sekolah

Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,10 tahun (2017) menjadi 11,37 tahun (2021) atau naik 0,27 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI.

Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Gambar III Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun  
Tahun 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

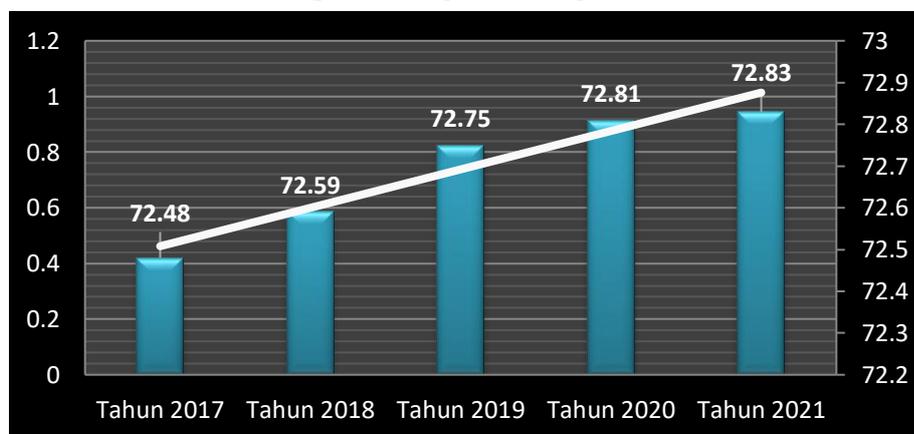
## B. Sasaran 2 “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” :

### *Angka Harapan Hidup*

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2017 hingga 2021, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2017) menjadi 72,83 tahun (2021) atau naik sebesar 0,35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

**Gambar III. Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2017-2021**



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021



Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2017 ke Tahun 2021, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit

### **C. Sasaran 3 “Meningkatnya Pemberdayaan Gender”**

#### *Indeks Pemberdayaan Gender*

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG di Kota Madiun tahun 2017 sebesar 82,19% mengalami sedikit peningkatan menjadi 82,28% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 menjadi 77,07 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 77,18. IPG Kota Madiun pada tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Sedangkan untuk Tahun 2020 mengalami kenaikan dari Tahun 2019 karena secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Gambar III. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017-2020**



Sumber : BPS Kota Madiun

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

*Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan



- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

*Kedua*, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

*Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.



#### 4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Pada Misi 4 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2020 (n-1)	2021 (n)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,44	6,69	6,69*

Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,44	6,69*	103,88

**Tabel III.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,69*	5,92*	5,52*

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Bappelitbangda Provinsi Jawa Timur \*2020

### 1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar tersebut yaitu :

#### 1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

##### a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.

Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita



- Share manufaktur terhadap PDRB
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.

Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang



2) PILAR 1 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

Dengan indikator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indikator :

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 1 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di



kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indicator :

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

Dengan Indikator :

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di tahun 2021 sebesar 6,38, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2021 belum rilis sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2020 sebesar 6,69 yang tergolong kategori memuaskan dan menjadi peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri.



**Sasaran Strategis “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

Sasaran 1		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	8,15	8,15	100
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	2,16	10,6	490,74
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa	0,58	11,32	1951,72

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

#### **A. Sasaran Menurunnya tingkat pengangguran terbuka**

##### *Tingkat Pengangguran terbuka*

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

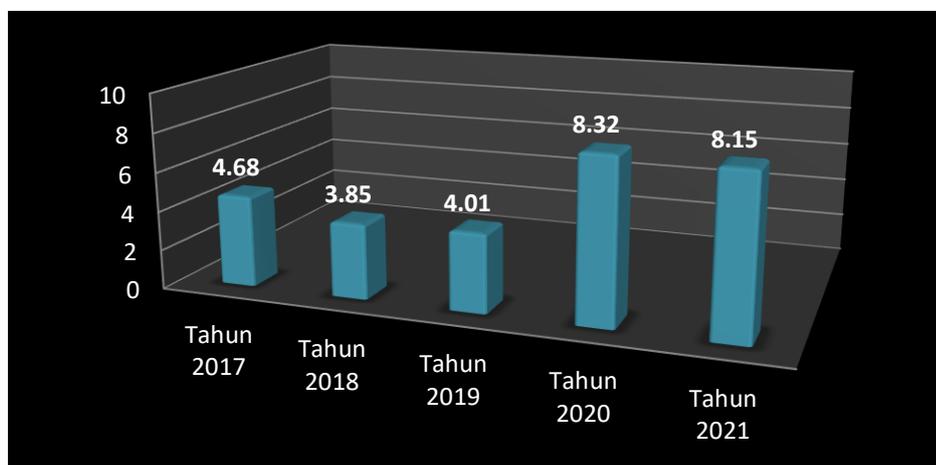
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT Kota Madiun hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 8,15 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan Agustus 2020.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2017-2021**



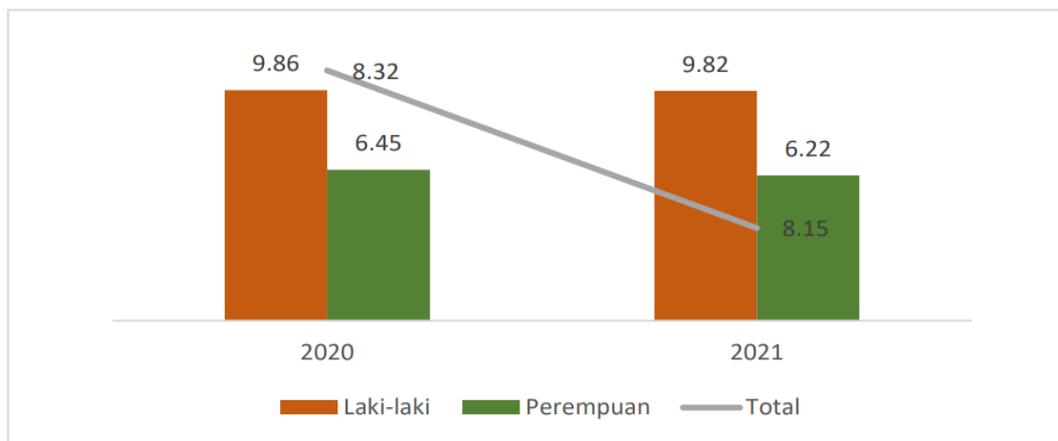
Sumber Data : Badan Pusat Statistik

#### 1) TPT Menurut Jenis Kelamin

TPT Menurut Jenis Kelamin Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 9,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,22 persen.

TPT Agustus 2021 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2020, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,23 persen poin.

Gambar Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2021



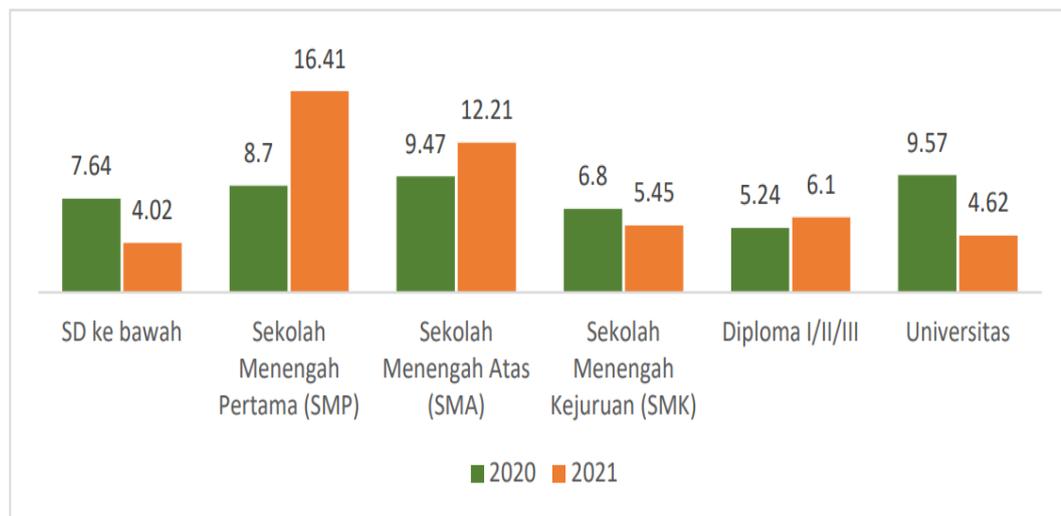
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021

## 2) TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sedikit berbeda antara Agustus 2021 dan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 16,41 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 4,02 persen. Sedangkan pada tahun 2020 TPT paling tinggi didominasi tamatan Universitas dan TPT terendah adalah tamatan Diploma I/II/ III. Dibandingkan Agustus 2020, TPT kategori pendidikan mengalami peningkatan untuk tamatan SMP, SMA dan Diploma I/II/III yaitu naik sebesar 7,72 persen poin, 2,74 persen poin dan 0,86 persen poin. Sedangkan TPT yang mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020

adalah Tamatan SD kebawah, SMK dan Universitas yang masing masing turun sebesar 3,62 persen poin, 1,35 persen poin dan 4,95 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- Pengangguran Karena COVID-19
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19
- Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 dan
- Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19.

Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

**Tabel III. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Agustus 2020–Agustus 2021**

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pengangguran <sup>1</sup> Karena COVID-19	1.437	1.243	-194	-13,50
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>2</sup> Karena COVID-19	166	1.165	999	601,81
c. Sementara Tidak Bekerja <sup>3</sup> Karena COVID-19	855	2.057	1.202	140,58
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	20.709	19.920	-789	-3,81
<b>Total</b>	<b>23.167</b>	<b>24.385</b>	<b>1.218</b>	<b>5,26</b>
Penduduk Usia Kerja (PUK)	143.561	144.219	658	0,46
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	16,14	16,91	0,77	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021

Pada Gambar Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 24.385 orang, mengalami kenaikan sebanyak 1.218 orang atau sebesar 5,26 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 1.243 orang pengangguran karena COVID-19; 1.165 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 2.057 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 19.920 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2020. Kenaikan terbesar adalah komponen sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1.202 orang.

Faktor Pendorong Keberhasilan menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun yaitu :

- Banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia
- Meningkatnya wirausaha baru
- Masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja
- Ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja.



Kesemuanya ini tidak lepas dari Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021. Adapun Faktor Penghambat yang berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka saat ini adalah masih adanya Pandemi Covid 19 sehingga penyerapan Tenaga Kerja belum optimal. Memperhatikan sejumlah kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk lebih menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2022 adalah :

- Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- Memberikan kesempatan uji kompetensi dan pemagangan bagi pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat terserap di dunia kerja.
- Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja secara online melalui Aplikasi SICAKER, untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja secara online.
- Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan.
- Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun.

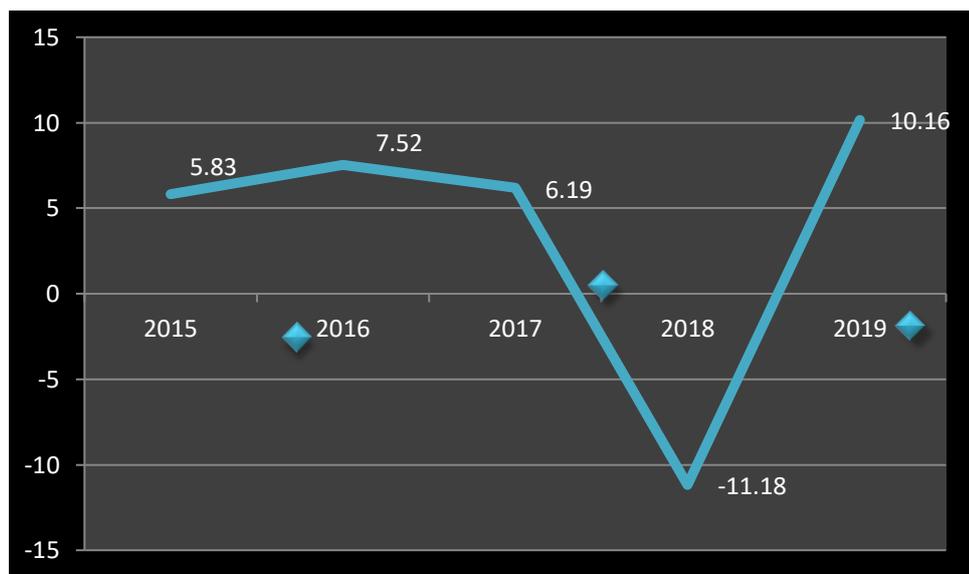
## B. Sasaran "Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi"

### 1. Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2021 adalah 10,16. Sedangkan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada tahun 2019 sebesar 5.82. Untuk tahun 2020 prosentase pertumbuhan sebesar (-10.83) atau mengalami kenaikan sebesar 16,65. Faktor Penghambat penurunan dari 2019-2020 karena adanya pandemi global covid-19 dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan. Di tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37 % dibandingkan dengan target tahun 2021.

Adapun perkembangan PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun mulai tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

**Gambar III. PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun Tahun 2017 – 2021**



Sumber : BPS Kota Madiun



Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Untuk data series pertumbuhan PDRB sector jasa menurut BPS pada tahun 2021 adalah sebesar 11,32 dengan capaian sebesar 1951,72% jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -0,93 atau mengalami kenaikan sebesar 12,25.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain :

- a) Melakukan Promosi Produk Perdagangan
- b) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- c) Melakukan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- d) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- e) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan
- f) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL
- g) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
- h) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
- i) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- j) Melakukan Promosi Pasar Rakyat
- k) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMPKM)
- l) Pembangunan jalur sepeda wisata penghubung lapak
- m) Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun



**Pada Misi 4 Tujuan 2 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut**

**Tabel III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2020 (n-1)	2021 (n)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	76,87	78,74
	Indek Gini	0,35	0,39	0,345

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

**Tabel III.21 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD**

Sasaran Strategis (Tujuan RPJMD)	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2021	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	78,74	101,99
	Indek Gini	0,35	0,345	109

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

**Tabel III.22. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional**

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Provinsi 2021	Realisasi Nasional 2021
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	78,74	N/A	N/A
	Indek Gini	0,345	0,74	0,384

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik



## 1. Indeks Ketentraman

Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

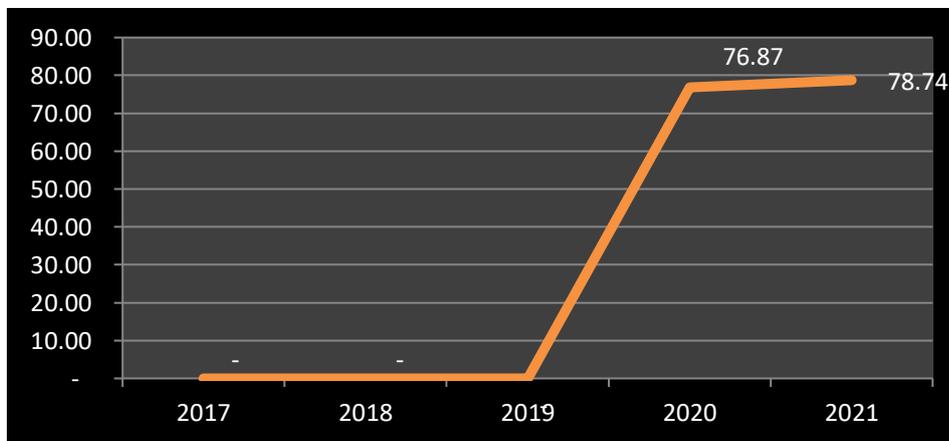
Indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2021 mencapai 101,99% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator persentase penegakan Perda. Persentase penegakan perda tahun 2021 di Kota Madiun telah mencapai 102,68%. Peningkatan keamanan dan ketentraman juga akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban :

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat Kota Madiun tahun 2021 bahwa Indeks Ketentraman di Kota Madiun memperoleh nilai 3,07 (nilai konversi adalah 78,74) dengan predikat B atau status / predikat "Kondusif" atau naik sebesar 1,87 jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 76,87. Sedangkan capaian tahun 2021 adalah sebesar 102,32% dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu sebesar 76,95. Untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum dilakukan penghitungan.

**Gambar III. Indeks Ketentraman Kota Madiun  
Tahun 2017-2021**



Sumber : Satpol Kota Madiun

## 2. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.

Penghitungan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

dimana,

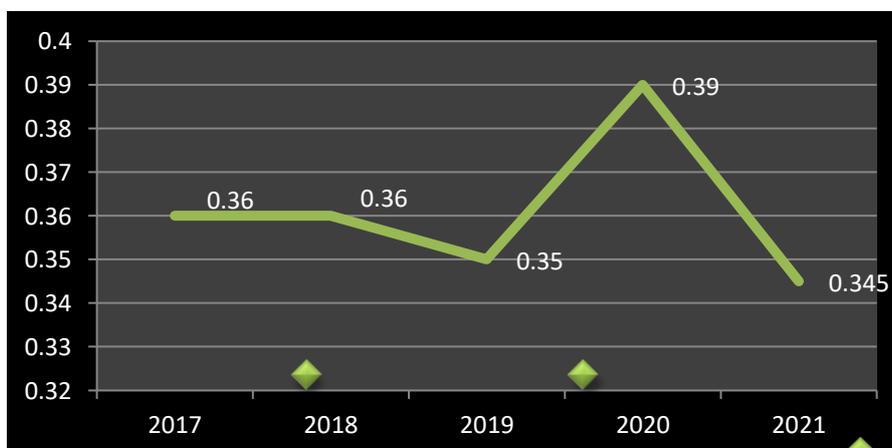
- GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
- $P_i$  : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- $F_i$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- $F_{i-1}$  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$x = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$x = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Adapun data series Indeks Gini Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

**Gambar III. Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun



Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kota Madiun dari tahun ke tahun capaiannya semakin membaik, yang menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin mengecil. Di tahun 2020 terdapat kenaikan Indeks Gini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Tetapi di tahun 2021 ketimpangan mengalami penurunan dengan Indeks Gini sebesar 0,345 yaitu dengan capaian sebesar 109% dari target yang telah ditetapkan. Atau terjadi penurunan ketimpangan sebesar 0,045. Hal ini disebabkan

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
- 2) Bantuan Sosial Air Bersih.
- 3) Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
- 4) Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
- 5) Bantuan Sosial Santunan Kematian.
- 6) Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
- 7) Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
- 8) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 9) Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

**Sasaran Strategis “Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :**

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
4.2.1	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,09	5.09	100
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	74,30	74,36	100,08
		Indeks Rasa Aman	74.30	81	101,37

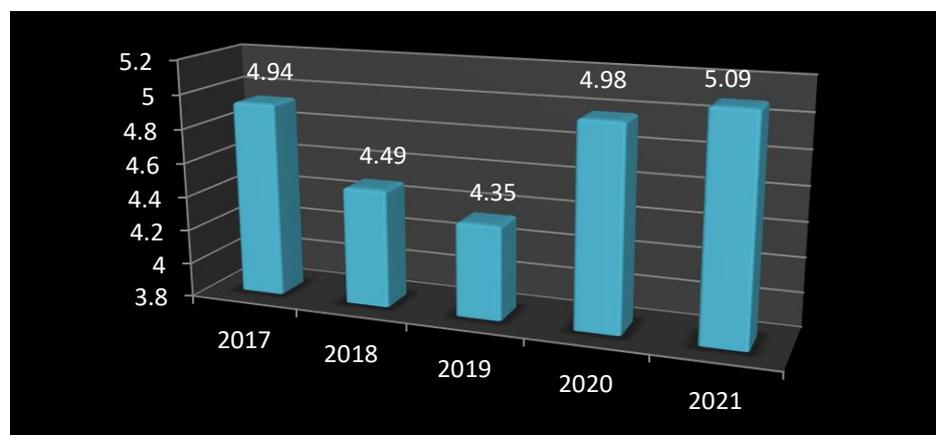
Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Bakesbangpol, Satpol PP, Bakesbangpol Kota Madiun

### A. Sasaran “Pengurangan Kemiskinan”

#### *Angka Kemiskinan*

Selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun bertambah sebanyak 0,23 ribu jiwa, dari 8,83 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 9,06 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 2,66 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen, dari 4,98 persen pada Maret 2020 menjadi 5,09 persen pada Maret 2021.

**Gambar Persentase Angka Kemiskinan Periode 2017-2021**



Sumber : BPS Kota Madiun



Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota Madiun miskin selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

1. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih -0,13 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
2. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kota Madiun masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.
6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.



## B. Sasaran "Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat"

### 1. Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2021 adalah 74,36 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,30 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,08 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 74,0306 dengan kenaikan sebesar 0,3294.

Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sarasehan Bela Negara
4. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
5. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan

6. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
7. Menyusun Peta Rawan Konflik
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

**Tabel III. Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun  
Tahun 2019-2021**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA
1.	2019	2,65	3,70 atau 73,95
2.	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
3.	2021	74,30	74,36

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2021*

## 2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan

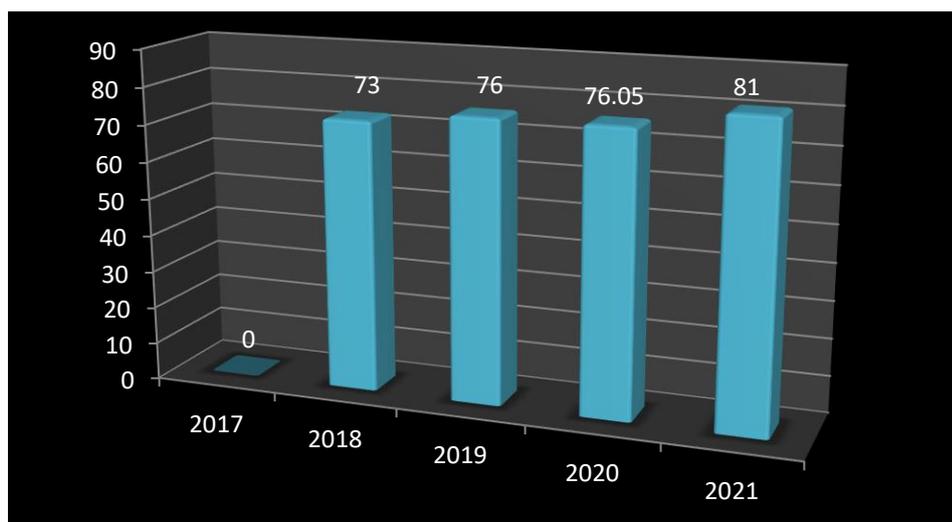
Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

- a) Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- b) Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- c) Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- d) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2020 adalah sebesar 76,05 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 100,06%. Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2021 adalah sebesar 81,00 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,15. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 101,37%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 naik sebesar 4,95 point.

**Gambar III. Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : Satpol PP Kota Madiun



## J. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2021, total anggaran belanja tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.275.325.306.646,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

Realisasi belanja APBD Kota Madiun Tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III. Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2021

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal	240.016.338.272,00	197.958.260.924,00	82,48%
Belanja Tak Terduga	57.887.426.585,00	15.841.760.294	27.37%
Belanja Operasi	977.421.541.789,00	859.879.322.395,91	87,97%
<b>Total APBD</b>	<b>1.275.325.306.646,00</b>	<b>1.073.679.343.613,92</b>	<b>84,19%</b>

Sumber : BKAD Kota Madiun



**Tabel III. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama  
Kota Madiun Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	344.457.980.479,00	260.153.552.912,88	75,53
2.	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	228.536.320.820,00	216.722.411.695,51	94,83
3.	Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	593.718.070.934,00	497.527.223.306,63	83,80
		Indeks Pembangunan Gender	1.186.488.816,00	1.153.978.610,00	97,26
4.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	50.570.141.332,00	47.560.829.091,90	94,05
5.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	27.474.682.977,00	25.582.028.748,00	93,11
		Indek Gini	29.380.621.538,00	24.979.319.249,00	85,02

Sumber : BKAD Kota Madiun



**Tabel III.26 Efisiensi anggaran belanja per sasaran tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	98,88	75,53	-
2.	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	100,42	94,83	5,59
3.	Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	100,40	83,80	16,60
		Indeks Pembangunan Gender	100,02	97,26	2,76
4.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	104,85	94,05	10,80
5.	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	102,32	93,11	9,21
		Indek Gini	102,63	85,02	17,61

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja dari 7 (tujuh) indikator makro tahun 2021 pada masing-masing sasaran strategis sudah berhasil dicapai kecuali 1 indikator yaitu Indeks Reformasi Brokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan sebesar 0,71 yaitu dari 65,55 di Tahun 2020 menjadi 66,26 di Tahun 2022 tetapi masih di bawah target yaitu 67, sehingga perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama di tingkat Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi birokrasi di Perangkat



Daerah. Secara umum capaian kinerja sudah tercapai di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities  
Terdapat 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk tingkat efisiensi belum bisa dihitung karena capaian kinerja sebesar 98,89 yaitu di bawah target yang ditetapkan meskipun secara nilai mengalami kenaikan sebesar 0,71 dari tahun 2020.
- 2) Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  
Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Livable City dengan tingkat efisiensi sebesar 5,59.
- 3) Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  
Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat efisiensi sebesar 16,60. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender sebesar 2,76
- 4) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif  
Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan tingkat efisiensi sebesar 10,80
- 5) Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat  
Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Ketentraman dengan tingkat efisiensi sebesar 9,21 dan Indeks Gini dengan tingkat efisiensi sebesar 85,02.



Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada tabel di atas, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya, dikarenakan pada masing-masing indikator bisa jadi dibiayai oleh anggaran pada Perangkat lain yang justru tidak bersentuhan secara langsung. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat multiplier effect bagi indikator lainnya. Misalnya capaian kinerja yang cukup tinggi pada sektor pariwisata, tentunya merupakan efek samping dari pembangunan sarana prasarana jalan dan jembatan di Kota Madiun dan publikasi potensi Kota Madiun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Masing-masing Perangkat Daerah saling bersinergi baik dari sisi anggaran maupun pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dengan tema dan prioritas pembangunan di Tahun 2021 yaitu *Penguatan Kapasitas Peningkatan pembangunan dan ketahanan sosial ekonomi menuju masyarakat sejahtera.*

Dalam masa pemerintahan tahun 2021 terdapat inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun:

#### 1. PEMBANGUNAN

##### 1) Pahlawan Street Center (PSC)

Pembangunan saluran multi manfaat, Pembangunan PSC memiliki fungsi antisipasi banjir instalasi kabel jalur bawah tempat wisata juga peningkatan UMKM setempat

##### 2) Lapak UMKM Kelurahan

Setiap Kelurahan wajib memiliki satu tempat menarik untuk pelaku UMKM setempat

##### 3) RTLH + Tempat Usaha

Program perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus penambahan tempat usaha



#### 4) Edupark Ngrowo Bening

Edupark Ngrowo Bening juga memiliki banyak fungsi, mulai bumi perkemahan, kebun sayur dan buah, budidaya lebah, budidaya ikan, tempat wisata an ekonomi tentunya

#### 5) Saluran Lingkungan Tertutup

Dalam priyek perbaikan saluran dan trotoar lingkungan Walikota menginstruksikan pemindahan saluran dari posisi tepi jalan ke tengah jalan. Sakuran dibuat besar di titik tengah dan tertutup. Jalan gang menjadi lebih lebar dan rapi. Tidak ada pemandangan sauran yang kotor dan bau.

## 2. EKONOMI

#### 1) Jalur Sepeda

Olah raga dan wisata menjadi upaya peningkatan ekonomi di Kota Madiun. Jalur ini melewati lokasi Lapak UMKM Kelurahan.

#### 2) Budidaya Lebah Madu

Budidaya lebah madu merupakan tindak lanjut dari prgram Kota Sejuta Bunga.

#### 3) Pecel Porang

Kolaborasi pecel dan porang diyakini bakal menjadi alternatif kuliner lokal dan menyebabkan bantunya

#### 4) Aplikasi Pro UMKM

Walikota mewajibkan ASN untuk berbelanja di UMKM dan PKL sekitar tempat tinggal atau kantor. Pelaporan program ini melalui aplikasi pro UMKM

#### 5) Kunyit Hitam dan Jahe Merah

Budidaya bibit kunyit hitam dan jahe merah untuk dibagikan kepada warga



### 3. SOSIAL

#### 1) Siaga Kita

Program asuransi kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja sektor

#### 2) Santunan Kematian

Santunan Rp. 1 Juta ke ahli waris setiap kematian

#### 3) Bekerja di Pemkot

Anak yatim/piatu dan atlet berprestasi diberikan pekerjaan di Pemkot Madiun

#### 4) Gerai Pakaian Bekas

Walikota Madiun menginstruksikan ASN untuk menyumbangkan pakaian bekas pantas untuk ditawarkan ke warga dalam gerai pakaian bekas

#### 5) Hadiah sepeda motor bagi masyarakat yang melaporkan adanya PUNGLI

### 4. PENANGANAN COVID-19

#### 1) Satu RT satu Dapur Umum

Penyediaan konsumsi bagi warga isoman melalui dapur umum dengan menggandeng pelakuPKL di RT tersebut. Program terpaksa dihentikan karena muncul kebijakan pemindahan isoman ke isoter

#### 2) Gerai Masker Gratis

Gerai masker mudah dijumpai di Kota Madiun. Selain itu juga ada gerai masker keliling menggunakan mobil.

#### 3) Mobil Logistik Covid-19

Bantuan sembako Covid-19 terus diberikan secara door to door

#### 4) Beasiswa Mahasiswa Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Mahasiswa anak korban Covid-19 tidak boleh putus kuliah

#### 5) Gerai Vaksinasi Covid-19

Layanan vaksinasi di tempat keramaian dan jemput bola dari rumah ke rumah. Masyarakat beruntung juga mendapatkan hadiah usai vaksinasi.



6) Vaksinasi dalam Kegiatan Resmi Pemerintahan

Layanan vaksinasi selalu dihadirkan dalam kegiatan resmi pemerintahan yang menghadirkan masyarakat

7) Rapid Antigen Gratis

Pemerintah menggandeng laboratorium swasta untuk menyediakan layanan rapid antigen gratis guna melakukan testing kepada masyarakat.

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan di tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Penghargaan DUKCAPIL BISA 2021
2. Penghargaan WTP dari BPK untuk LKPD Tahun Anggaran 2021
3. Penghargaan BKKN Kategori Penilaian Kompetisi
4. Penghargaan TOP 10 Walikota Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Timur
5. Penghargaan Eradikasi Frambusia
6. Penghargaan Kwartir Cabang
7. Penghargaan Gugus Depan
8. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2020
9. Penghargaan Lomba Video Bakti Ramada Kwardcab dan Gudep
10. Juara Pertama Lomba Colors of Voices Singing Contest dan International Vestifal of Language and Culture (ILFC) kepada Bernadeta Salwa Nirina
11. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Nindya
12. Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) BKKBN
13. Solopos Digital Award
14. Penghargaan 1 Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Banjarejo
15. Penghargaan kepada LPPL Radio Suara Madiun sebagai aktif dan partisipatif dalam program siaran berjaringan Airlangga Forum
16. Juara 1 Lomba Bertutur Tingkat Nasional Perpunas kepada Pelangi Tunjung Kusuma



17. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Katagori Madya atas hasil evaluasi pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender (PUG) 2020
18. Medali Emas Cabor Basket PON XX Papua oleh Janan Salma Najyah
19. Pelatih Tim Sepak Takraw Jatim (Medali Emas dan Perak) oleh Ony Diar Ahyanto
20. Medali Perak Cabor Atletik 4x100 meter PON XX Papua oleh oleh Susi Dewi Wulandari
21. Medali Perak Cabor Kurash Peror Kelas 52 Kilogram oleh Safira Dyah Fitri Riskianti
22. Kategorti Best Speech dalam ajang pemilihan Putri Remaja Indonesia dan Forensa Thitania Agpenta Putri
23. Penghargaan Capaian Vaksinasi Covid-19 Tertinggi se-Jawa Timur oleh Harian Surya
24. Putri Cilik Indoesia Pendidikan 2021 oleh Mutiara Salwa Kirana
25. Lolos Gala Siswa Indonesia (GSI) Fariz Hasbi Habibi
26. BKN Award 2021 peringkat Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan, Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun
27. Penghargaan One Persantren One Product (OPOP)
28. Inotek Award 2021 Provinsi Jawa Timur 2021
29. Penghargaan Badan Publik Infromatif Tingkat Kab/kota se-Jawa Timur Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Jawa Timur
30. Sekolah Adiwiyata 2021
31. Smart City Gerakan Menuju Smart City
32. Penghargaan Kota Ramah

Dengan ditetapkannya regulasi kebijakan pusat yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan maupun penganggaran, maka Pemerintah Kota telah melakukan perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024. Berikut gambaran terkait perubahan RPJMD Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terhadap pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun

**Gambar III.15. Konstruksi Pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota pada Perubahan RPJMD Madiun 2019-2024**



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun

**Gambar III.16. Proses Bisnis RPJMD Perubahan Kota Madiun 2019-2024**



Sumber Data : Bapelitbangda Kota Madiun



## P<sup>BAB IV</sup> ENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 7 (tujuh) indikator. Dari capaian 7 indikator terdapat 6 indikator yang telah melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Secara nilai Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan sebesar 0,71 yaitu dari 65,55 di Tahun 2020 menjadi 66,26 di Tahun 2022 tetapi masih di bawah target yaitu 67, sehingga perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama di tingkat Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi birokrasi di Perangkat Daerah. Secara umum capaian kinerja sudah tercapai di atas 100%.



Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya sudah efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pemerintah Kota Madiun selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang agar capaian menjadi lebih baik terutama pada capaian indikator sasaran yang belum memenuhi target

## B. Permasalahan

Permasalahan tidak tercapainya 1 (satu) indikator sasaran tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Hasil antara dari Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa masih kurang dan Kualitas Pengelolaan Arsip masih dengan kategori cukup
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah masih belum dilaksanakan dengan optimal
3. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah sehingga belum sepenuhnya berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan
4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun masih rendah
5. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
6. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
7. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
8. Ukuran kinerja eselon III, IV, dan individu, serta mengukur dan mengaitkannya dengan remunerasi/penghargaan



9. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
10. Dinamisasi regulasi pusat yang membutuhkan tahap penyesuaian di tingkat Daerah.

### **C. Upaya Meningkatkan Kinerja**

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melaksanakan pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan Covid-19
2. Melaksanakan penyesuaian APBD dan perencanaan terkait dengan perubahan regulasi kebijakan pusat
3. Adanya sinkronisasi prioritas pembangunan dengan provinsi maupun pusat
4. Pergeseran fokus pembangunan sebagai upaya perbaikan perekonomian rakyat di mas Pandemi Covid-19 yaitu fokus terhadap program prioritas yaitu kelurahan mandiri, ekonomi kerakyatan dan pembangunan berbasis masyarakat
5. Melakukan Perubahan SOTK dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
6. Melakukan perubahan RPJMD 2019-2020 dengan proses bisnis utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi dan daya saing daerah
7. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran berdasarkan proses bisnis Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi mis Walikota dan Wakil Walikota
8. Melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun